

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ASEAN
PADA MASA ADAM MALIK TAHUN 1967 – 1973**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun Oleh :

JOISE PANCA AGUSTINA

Nim : 991314017

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

YOGYAKARTA

2005

SKRIPSI
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ASEAN
PADA MASA ADAM MALIK TAHUN 1967-1973

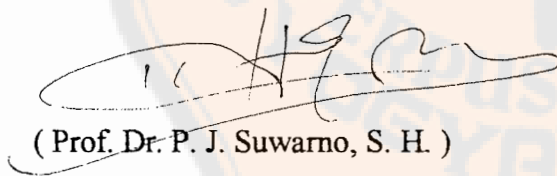
Oleh :

Joise Panca Agustina

NIM : 991314017

Telah disetujui oleh :

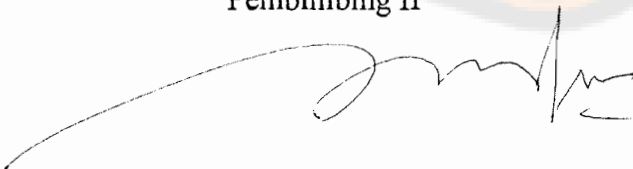
Pembimbing I



(Prof. Dr. P. J. Suwarno, S. H.)

Tanggal... 4 Maret 2005

Pembimbing II



(Drs. Sutarjo Adisusilo, J. R.)

Tanggal... 4 Maret 2005

SKRIPSI
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ASEAN
PADA MASA ADAM MALIK TAHUN 1967-1973

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Joise Panca Agustina




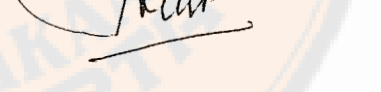
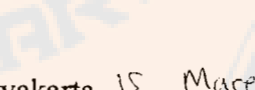
NIM : 991314017

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 15 Maret 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

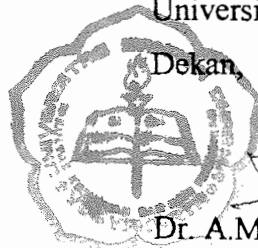
Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. S. Adikusilo J.R., S.Th.	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M. Pd.	
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwano, S.H.	
Anggota	Drs. S. Adikusilo J.R., S.Th.	
Anggota	Drs. A.K. Wiharyanto, M.M	

Yogyakarta 15 Maret 2005.....

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



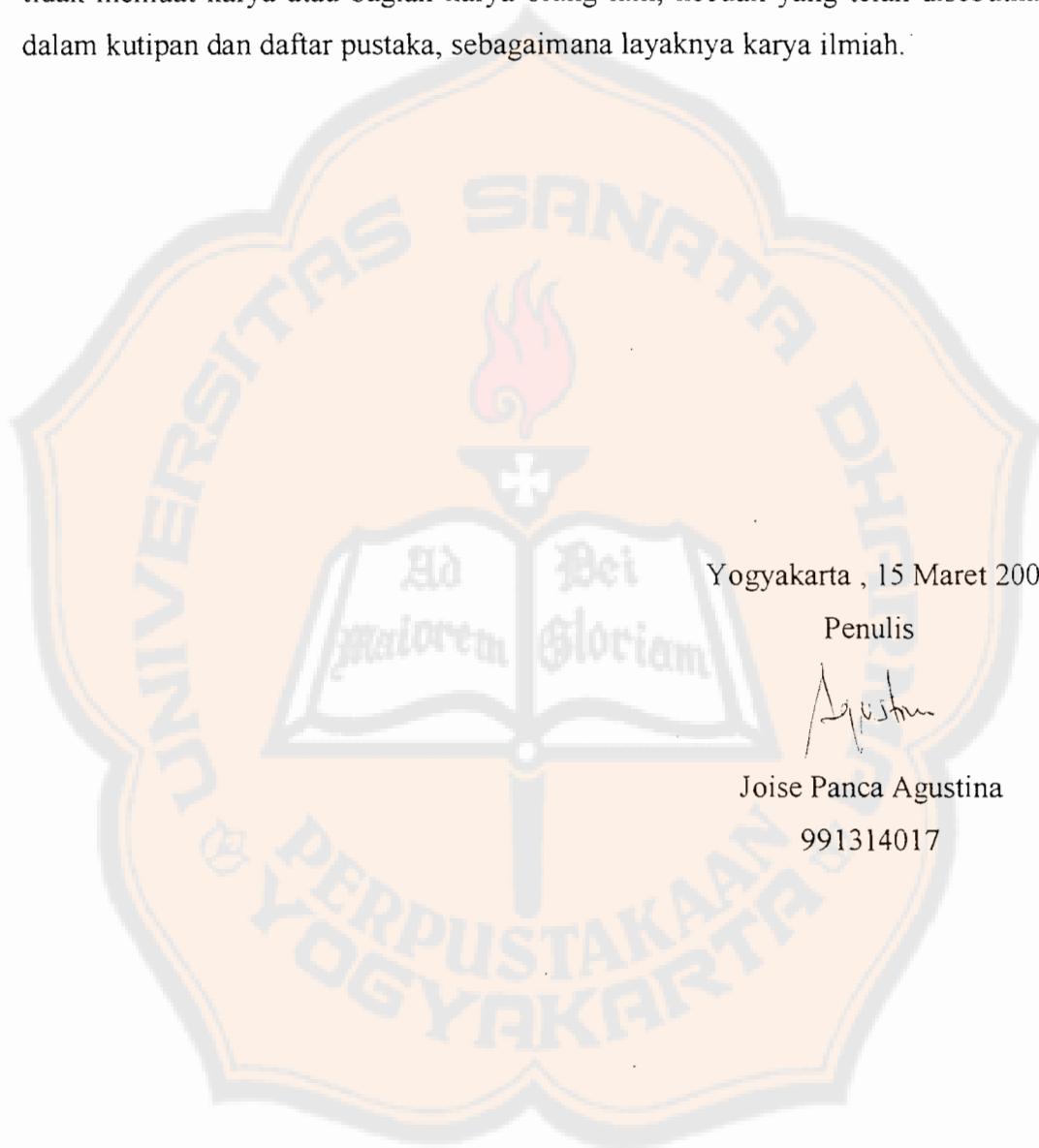
Dekan,


Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pernyataan Keaslian Karya

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.



Yogyakarta , 15 Maret 2005

Penulis

Joise Panca Agustina

991314017

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa cinta dan syukur skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Tuhanku Yesus Kristus yang slalu menyertaiku untuk selama-lamanya
- Alm. A. Soekamto, ananda tau walaupun bapak tidak berada didekat ananda tapi ananda yakin bapak slalu berdoa untuk keberhasilan ananda.
- M.M. Sri Sawarni tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kakak-kakaku dan semua keponakan-kaeponakanku yang telah memberikan doa dan semangat.
- F. Jerry Yuniarto, S. T., terima kasih atas segalanya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Motto

**Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya
(Pengkotbah 3 : 11)**

Jangan menyerah sebelum berusaha

**“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh
kepercayaan, kamu akan menerimanya “
(Matius 21 : 22)**

**Kepercayaan diri, keyakinan akan berhasil, kepastian akan masa
depan dan kerja keras adalah kesuksesan akan hidup**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973*.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

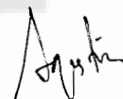
1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
3. Bapak Prof. Dr. P. J. Suwarno, S. H., selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. Sutarjo Adi Susilo, J. R., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. A. A. Padi, selaku pembimbing akademik yang telah memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Karyawan Perpustakaan Sanata Dharma yang telah membantu penulis berkaitan dengan skripsi ini.
7. Bapak Alm. A. Soekanto dan Ibu M. M. Sri Sawarni, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
8. Kakak-kakakku tercinta yang telah memberi dukungan dengan doa dan saran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Keponakan-keponakanku, kenakalan, dan kepolosan kalian menjadi dorongan tersendiri dalam penulisan skripsi ini.
10. Ferdinandus Jerry Yuniarto, S. T., yang slalu memberikan perhatian, doa, semangat, kesabaran, cinta serta kesetiaan.
11. Sahabat-sahabat yang selalu memberi arti dalam kehidupanku Dwi Lestari Andarini, S.E., Pikacu, Cucumi, Khumir, Summy, yang selalu setia mendengarkan curhatku dan selalu membantuku di masa-masa sulit, Thank's Friends.
12. Teman-temanku, Sumiwi Astuti, S.Pd., Stefanus kartika W.N.P, S.Pd., Winarti, S.Pd., Lukastini, Dini, Christin, Mbak Santi, yang memberikan warna tersendiri dalam kehidupanku.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala hal yang berhubungan dengan skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis. Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan, maka segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Maret 2005



Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Judul : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik

Tahun 1967-1973

Oleh : Joise Panca Agustina

NIM : 991314017

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973”. Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas, yaitu 1. Pengertian, landasan, dan tujuan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik, 2. Keberhasilan politik luar negeri Indonesia masa Adam Malik dan dampaknya, 3. Politik luar negeri Adam Malik terhadap anggota-anggota ASEAN.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang mencakup : heuristik, kritik sumber, interpretasi, serta historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan personal, pendekatan politik dan pendekatan ekonomis. Penulisan ini dikaji secara deskriptis analitis.

Dari penelitian ini diketahui bahwa 1. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif yang diatur dalam pembukaan alinea pertama serta alinea keempat UUD 1945. Landasan politik luar negeri bebas aktif meliputi landasan ideal, landasan structural erta landasan operasional. Tujuan politik luar negeri Indonesia telah terumuskan dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat. 2. Adam Malik berhasil menyelesaikan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Adam Malik membentuk ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan kerjasama regional di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Adam Malik juga berhasil memulihkan perekonomian Indonesia. 3. Politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota ASEAN didasarkan pada rasa saling percaya dan saling menghormati pada negara-negara anggota ASEAN yang mengadakan hubungan kerjasama bilateral. Sehingga kedua negara sama-sama mendapat keuntungan dari kerjasama yang dijalankan.

ABSTRACT

Title : Indonesia Foreign Politic to ASEAN in the Adam Malik Period

In the Year 1967-1973

By : Joise Panca Agustina

NIM : 991314017

The purpose of writing this thesis is to describe and to analyze the “Indonesian Foreign politic to ASEAN in Adam Malik Period in the Year 1967-1973”. In this thesis, there are three problems formulated. They are 1. The meaning, bases and the purpose of Indonesian Foreign politic to ASEAN in Adam Malik period, 2. The success of Indonesian foreign politic in Adam Malik period and its impact, 3. The foreign politic of Adam Malik to ASEAN members.

The method used in this research is historical method consisting of : heuristic, source critics, interpretation, and historiography. The approach used are personal approach, political approach and economic approach. The writing is reviewed analytic descriptively.

From the research, it's known that 1. The Indonesian foreign politic is active-free in nature that is regulated in first paragraph and fourth paragraph of the preamble of UUD 1945. The base of foreign politic of active-free consist of ideal, structural and operational bases. The purpose of Indonesian foreign politic is formulated in the preamble of UUD 1945, especially in fourth paragraph. 2. Adam Malik is successfull in finishing the normalization of Indonesia-Malaysia relationship. Adam Malik founds ASEAN that useful to do cooperation regionally in the area of economy, social and culture. Adam Malik is also successful to recover the Indonesian economy. 3. The foreign politic of Adam Malik to the members of ASEAN is based on the trust and respect to each other in ASEAN members that doing the bilateral cooperation. So, both of countries get advantage from the cooperation.

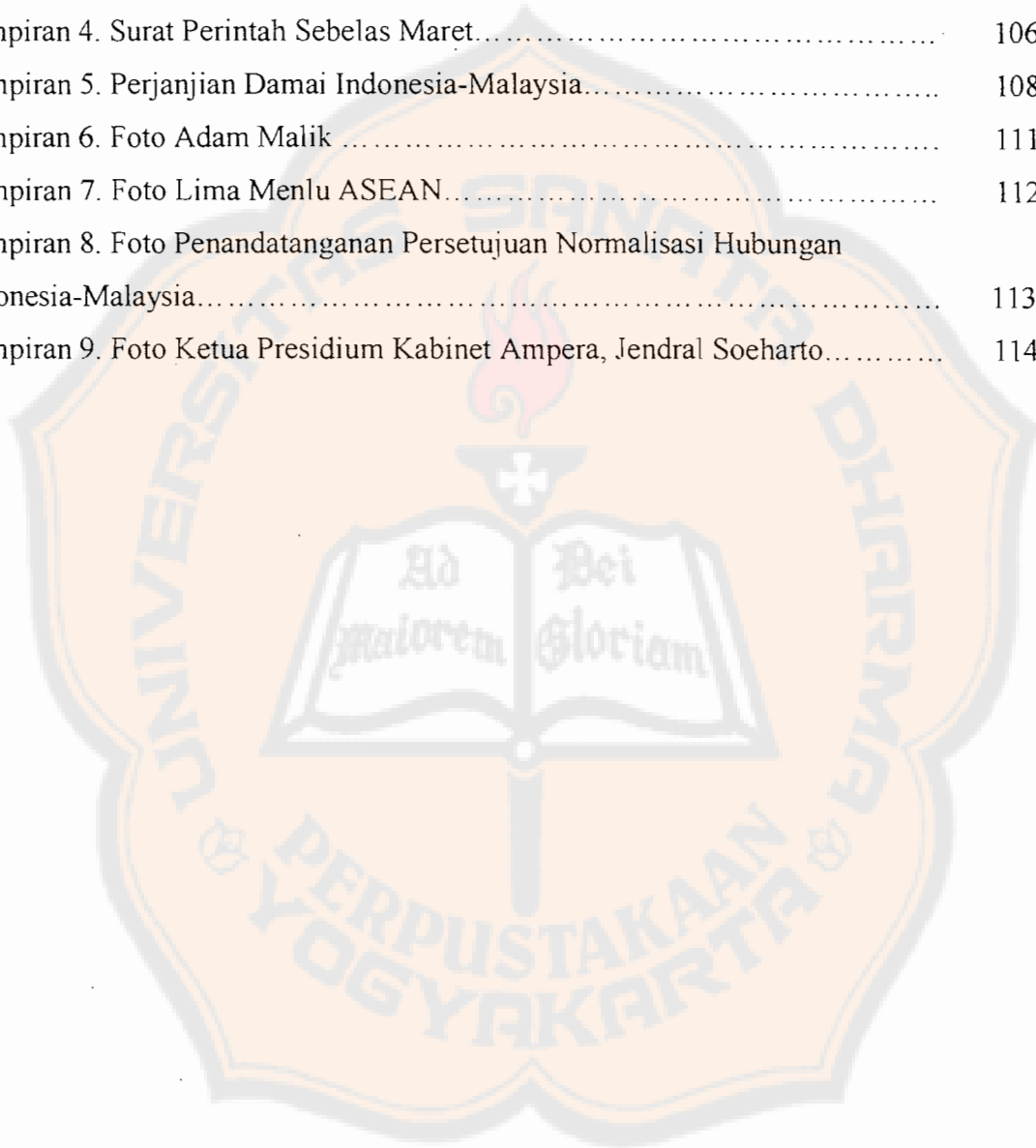
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Sumber	12
F. Landasan Teori	17
G. Hipotesis	20
H. Metode dan Pendekatan Penelitian	21
BAB II PENGERTIAN, LANDASAN, DAN TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF MASA ADAM MALIK	
A. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif	26
B. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif	30
C. Tujuan Politik Luar Negeri Bebas Aktif	37

BAB III	KEBERHASILAN POLITIK LUAR NEGERI	
	INDONESIA TERHADAP ASEAN PADA MASA	
	ADAM MALIK DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA	
A.	Biografi Adam Malik	41
B.	Keberhasilan Adam Malik dalam Usaha Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia	57
C.	Keberhasilan Adam Malik dalam Pembentukan ASEAN	61
D.	Dampak Keberhasilan Politik Luar Negeri Bagi Indonesia	72
BAB IV	POLITIK LUAR NEGERI ADAM MALIK	
	TERHADAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN	
A.	Politik Luar Negeri Adam Malik Terhadap Malaysia	74
B.	Politik Luar Negeri Adam Malik Terhadap Singapura	79
C.	Politik Luar Negeri Adam Malik Terhadap Pilipina	81
D.	Politik Luar Negeri Adam Malik Terhadap Thailand	82
BAB V	PENUTUP	
	Kesimpulan	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
Lampiran 1. Silabus	90
Lampiran 2. Penilaian atau Evaluasi.....	101
Lampiran 3. Uraian Materi.....	103
Lampiran 4. Surat Perintah Sebelas Maret.....	106
Lampiran 5. Perjanjian Damai Indonesia-Malaysia.....	108
Lampiran 6. Foto Adam Malik	111
Lampiran 7. Foto Lima Menlu ASEAN.....	112
Lampiran 8. Foto Penandatanganan Persetujuan Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia.....	113
Lampiran 9. Foto Ketua Presidium Kabinet Ampera, Jendral Soeharto.....	114



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antarnegara di dunia merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai konsekuensi dari tuntutan perkembangan jaman. Suatu negara membutuhkan negara lain sebagai patner dalam mewujudkan konsep-konsep idealnya. Untuk menuju pada pola hubungan yang baik dan bermakna di antara kedua negara yang berinteraksi itu dibutuhkan proses dan saling memahami yang kadangkala tidak mudah untuk mencapainya.

Tujuan suatu negara mengadakan hubungan internasional adalah agar negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Apabila kepentingan-kepentingan nasional tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dan tidak dapat dipertemukan, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik¹.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak luput dari usaha untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain baik secara regional maupun internasional. Selama menjalin hubungan dengan negara lain bukan berarti Indonesia tidak pernah mengalami ketegangan akibat perbedaan kepentingan nasionalnya.

Dalam sejarah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, tercatat seorang tokoh yang mempunyai peranan besar bahkan dianggap telah

¹ Syamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN : Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*. Jakarta, Ghalia, 1995, hlm. 15

meletakkan dasar politik luar negeri Orde Baru². Tokoh tersebut adalah Adam Malik, seorang otodidak yang mampu menempati posisi penting di pemerintahan.

Adam Malik lahir di kampung Keling, Pematang Siantar pada hari Minggu Pon tanggal 22 Juli 1917 bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1335 Hijriyah. Adam Malik yang bermarga Batubara, adalah anak ketiga dari sembilan bersaudara dari keluarga Haji Abdul Malik. Abdul Malik merupakan keturunan petani dan keluarganya pemeluk agama Islam. Ibunya bernama Siti Salamah yang berasal dari Cemar, negara bagian Perak, Malaysia³. Abdul Malik memulai usaha dagangnya ketika Pematang Siantar mulai ramai dengan dibukanya perkebunan-perkebunan oleh kolonial Belanda. Toko yang dikelola Abdul Malik melayani berbagai kebutuhan hidup para kuli perkebunan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dagang tersebut mengantarkan keluarga Abdul Malik menjadi salah satu orang terkaya di Pematang Siantar.

Terlahir dari keluarga kaya dan pemeluk agama Islam yang taat pada ajaran agamanya, Adam Malik sejak semula direncanakan oleh orang tuanya untuk dididik sebagai santri. Setamat dari *Hollands Inlandsche School* atau HIS, Adam Malik dikirim ke sekolah agama Parabek di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Kemudian Ia keluar dan dimasukkan ke sekolah agama Al-Masrullah di Tanjung Pura, dekat Pematang Siantar yang juga tidak bertahan lama.

² Manuel Kaisiepo, "Setengah Abad di Panggung Politik : Perjuangan Bung Adam" dalam *Prisma*, No. 11 Tahun XIII, 1984

³ Solichin Salam, *Adam Malik Profil Seorang Pejuang*, Jakarta, Gunung Jati, 1978, hlm. 7

Dengan latar belakang pendidikan yang tidak begitu tinggi, ditambah kegemarannya membaca, Adam Malik bisa mengerti dan memahami berbagai bahasa asing. Dengan kemahiran yang dimilikinya itu Adam Malik dapat memergunakannya dalam segala hubungan dan kegiatannya. Sebenarnya Adam Malik tidak sepenuh hati ketika dikirim ke sekolah-sekolah agama tersebut, kesediaannya semata-mata karena ingin lepas dari perasaan tertekan setelah melihat realitas kemiskinan kuli kontrak.

Adam Malik mengawali keterlibatannya dalam politik pada tahun 1930-an di Pematang Siantar. Sejak semula Adam Malik secara sadar memilih bidang politik, melalui mengabdikan dirinya bagi perjuangan bangsanya mencapai kemerdekaan yang kemudian ikut berperan secara fungsional sesudah kemerdekaan itu dicapai.

Dalam proses sosialisasi politiknya ada dua faktor yang mempengaruhi Adam Malik. Pertama, realitas kemiskinan kuli kontrak yang bekerja di perkebunan milik Belanda. Kedua, ide-ide progresif yang dibacanya dalam berbagai surat kabar dan majalah yang terbit waktu itu. Dua faktor inilah yang akhirnya membentuk kesadaran politiknya. Sebagai persiapan untuk terjun ke dunia politik yang sesungguhnya, Adam Malik masuk kepanduan Hisbul Wathan. Kemudian langkahnya lebih berani dengan mendirikan cabang Indonesia Muda dan Perkumpulan Sopir-Sopir Indonesia⁴.

⁴ Manuel Kaisiepo, *op. cit.*, hlm. 17

Menurut rekannya sesama wartawan, Hamid Lubis, mengatakan bahwa sejak remaja Adam Malik berbakat menjadi organisator⁵. Sementara itu rekannya yang lain menilai Adam Malik mempunyai pembawaan yang khas yaitu selalu mengambil keputusan dengan cepat baik dalam berpikir, berbicara dan bertindak. Adam Malik merupakan pemikir yang aktif, dinamis dan selalu optimis. “ Semua bisa diatur ” adalah kata yang sering diucapkan Adam Malik yang menunjukkan optimisme yang tinggi bahwa segala sesuatu bisa dicapai asal ada kemauan. Sederhana dan rendah hati adalah sikapnya yang menonjol. Sebelum pindah ke Jakarta tahun 1934, Adam Malik mendirikan cabang PARTINDO⁶ di Pematang Siantar. Setelah pindah ke Jakarta, Adam Malik mulai aktif lagi dalam pergerakan politik yang lebih radikal.

Pada Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno berakhir sebagai akibat adanya peristiwa G 30 S/ PKI tahun 1966. Orde Baru lahir sebagai suatu kekuatan yang bersifat korektif atas Orde sebelumnya. Politik luar negeri Orde Lama yang memihak ke Blok Komunis telah melahirkan berbagai penyelewengan yang pada akhirnya situasi politik Indonesia labil. Di samping itu terjadi krisis perekonomian akibat menumpuknya hutang-hutang luar negeri.

Pada masa Orde Baru peranan Adam Malik sangat menonjol terutama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pada pemerintahan Orde Baru ini Adam Malik dipercaya sebagai menteri luar negeri. Dalam

⁵ Bachtiar Djamil, *Hidup dan Perjuangan Adam Malik*, Jakarta, Selecta Group, 1980, hlm. 286

⁶ PARTINDO atau Partai Indonesia merupakan partai politik yang didirikan oleh bekas anggota Partai Nasional Indonesia yang tidak dipenjara oleh pemerintah kolonial.

keterangan persnya pada tanggal 4 April 1966, Adam Malik mengatakan bahwa pemerintahnya akan mempertimbangkan kembali dan mengevaluasi kembali kebijaksanaan luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya dan akan dituntun oleh realitas yang ada di dunia luar⁷. Maka sebagai menteri luar negeri, Adam Malik mempunyai peran penting untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif secara konsisten. Di tingkat regional, Adam Malik merupakan tokoh di balik suksesnya pembentukan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara yang kemudian dikenal dengan sebutan ASEAN (*Association of South East Asian Nation*). Kemudian kemampuan yang luar biasa dalam dunia diplomasi itu akhirnya mendapat pengakuan dunia ketika ia terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB periode 1971-1972.

ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Dalam rapat terbuka di Bangkok ditandatangani Deklarasi Bangkok yang dianggap sebagai Piagam ASEAN. Nama perhimpunan tersebut diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik setelah usul sebelumnya dengan nama SEAARC (*Southeast Asian Association for Regional Cooperation*) ditolak oleh sidang.

ASEAN sebagai kerjasama regional dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Asia Tenggara sebelumnya, terutama dalam hubungan dua kerjasama : ASA (*Association of Southeast Asia*) anggotanya adalah Philipina, Muangthai, Malaysia dan MAPHILINDO (Malaysia,

⁷ Michael Leifer, *Indonesian Foreign Politic*, (terj. A. Ramlan Surbakti). *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1989, hlm. 165

Philipina, dan Indonesia). Kedua kerjasama regional tersebut mempunyai pengaruh terhadap pembentukan ASEAN, adalah satu hal yang tidak dapat diingkari.

Pada mulanya ketika pemikiran untuk melanjutkan kerjasama regional di Asia Tenggara mulai timbul terutama pada saat-saat mulai berakhirnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, pihak Malaysia menginginkan agar ASA dapat dipertahankan dan jika perlu memperluas keanggotaannya. Sebaliknya pihak Indonesia menyodorkan MAPHILINDO untuk dijadikan dasar kerjasama regional yang akan datang.

Dalam menelusuri latar belakang terbentuknya ASEAN dianggap perlu untuk melihat peristiwa yang terjadi di Asia Tenggara sekitar tahun 1965-1966. Peristiwa tersebut erat kaitannya dengan pembentukan ASEAN., mungkin yang paling penting adalah munculnya ORBA di Indonesia menggantikan ORLA. Dengan tampilnya Orde Baru, konfrontasi terhadap Malaysia diakhiri, dan dengan demikian hubungan Indonesia-Malaysia yang berantakan sejak lahirnya Malaysia tahun 1963 kembali menjadi normal.

Ketika ASEAN dibentuk anggotanya hanya terdiri dari bekas anggota MAPHILINDO dan ASA ditambah dengan Singapura. Negara-negara anggota ASEAN mempunyai motivasi yang berbeda satu sama lain untuk bergabung dalam ASEAN.

Motivasi Indonesia

Di masa lalu, Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya lebih banyak menitikberatkan segi bilateral dan multilateral dari pada segi

regional, maksudnya bahwa Indonesia dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain tidak membeda-bedakan wilayahnya, tetapi sekarang Indonesia lebih memfokuskan kerjasama dengan negara dalam satu kawasan. Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bersifat non-komunis dan senantiasa tidak ingin menjadi obyek negara adikuasa. Pendirian yang akhirnya dikenal sebagai Non-Blok itu senantiasa merupakan ciri khas politik luar negeri Indonesia.

Pada hakikatnya gagasan kerjasama regional bukanlah hal baru, walaupun bagi Indonesia sendiri. Di masa Orde Lamapun misalnya, Indonesia pernah menjadi anggota MAPHILINDO, yang juga merupakan satu bentuk kerjasama regional Asia Tenggara.

Pertimbangan pemerintah Orde Baru untuk ikut serta dalam kerjasama regional Asia Tenggara, pertama-tama adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah luntur dan kredibilitas yang telah hancur akibat politik konfrontasi terhadap Malaysia, dan kedua barulah pertimbangan keamanan. Di samping itu, dapat pula dipahami bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan keadaan dalam negeri yang aman dan stabil. Tanpa stabilitas nasional prospek pembangunan tidak mempunyai harapan banyak, karena negara-negara yang memiliki modal tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Kemantapan stabilitas nasional pada gilirannya baru akan terjamin apabila ditunjang oleh stabilitas regional. Pertimbangan keamanan ini mendorong Orde Baru untuk ikut kerjasama ASEAN.

Motivasi Singapura

Singapura menggabungkan diri ke dalam ASEAN karena didorong oleh dua pertimbangan yang sangat mendasar. Pertama, negara itu sangat berkepentingan dalam memperbaiki hubungannya dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Indonesia dengan biaya serendah mungkin.

Kedua, Singapura ingin mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi yang sebesar-basarnya, hal ini tidak mungkin diperoleh tanpa menjalin hubungan normal dengan negara tetangga.

Pembentukan ASEAN dilihat sebagai satu kesempatan baik untuk menciptakan hubungan seimbang, dan Singapura dengan sendirinya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Menurut Thanat Khoman (wakil dari Thailand), Menlu Singapura Rajaratnam datang menemuinya di Bangkok dan menyatakan tekad Singapura untuk menjadi anggota ASEAN.

Motivasi Malaysia

Motivasi Malaysia menggabungkan diri ke dalam ASEAN mempunyai corak tersendiri. Di sekitar bulan Maret 1967, dalam suatu keterangannya pada sebuah harian India, Adam Malik menyatakan bahwa pada masa tiga bulan Indonesia akan mensponsori satu konferensi negara-negara Asia Tenggara untuk membicarakan kerjasama regional.

Usaha untuk mewujudkan kerjasama regional baru dipelopori oleh Adam Malik dan Thanat Khoman. Adam Malik memusatkan usahanya untuk membujuk Birma dan Kamboja agar ikut serta, sedang Thanat memusatkan usahanya untuk membujuk Tengku.

Kesediaan Malaysia untuk ikut serta dalam kerjasama ASEAN didasarkan antara lain pada pertimbangan-pertimbangan bahwa Indonesia di bawah Orde Baru adalah lain dari Indonesia di bawah Orde Lama, bahwa Indonesia akan dapat lebih dijinakkan dengan jalan mendekatinya daripada menjauhinya seperti terjadi di masa lalu, lagi pula Malaysia mempertimbangkan bahwa menjauhi ASEAN akan berarti terkucilnya Malaysia dari kegiatan masyarakat Asia Tenggara, hal yang sangat bertentangan dengan kecenderungan politik luar negeri Malaysia selama ini.

Motivasi Thailand

Setelah berakhirnya konfrontasi, Menlu Thanat Khoman melanjutkan usahanya dengan mengunjungi Jakarta antara 29-30 Agustus 1966. Kunjungan itu bertujuan sebagai follow-up dan membicarakan pertemuan di Bangkok, mengenai pembentukan organisasi baru kerjasama regional Asia Tenggara. Kedua Menlu mengadakan pertukaran pikiran secara mendalam mengenai hal tersebut. Adam Malik menjelaskan bahwa "Indonesia tidak bisa hidup sendiri, perlu kerjasama dengan negara lain," sedangkan Thanat Khoman menyatakan : Negara-negara di luar ASA perlu diajak mencari jalan damai atas persoalan-persoalan yang terjadi di Asia.

Motivasi Pilipina

Kesediaan Pilipina untuk ikut serta dalam kerjasama ASEAN didasarkan pada keinginan untuk membina hubungan dengan negara-negara tetangga dan mencari pasaran untuk hasil industri Pilipina. Dengan demikian

Pilipina dapat meningkatkan penghasilannya dan ikut serta dalam kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Berangkat dari uraian di atas tersebut maka skripsi ini mencoba mengkaji bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dari tahun 1967-1973. Ketertarikan penulis mengambil judul Politik Luar Negeri Indonesia masa Adam Malik Tahun 1967-1973. Ada dua alasan, yaitu alasan obyektif dan alasan subyektif.

Alasan obyektif mencakup Adam Malik adalah seorang otodidak yang mampu memegang peranan penting dalam pemerintahan Indonesia, Adam Malik dianggap sebagai peletak dasar pelaksanaan politik luar negeri masa Orde Baru, dan Adam Malik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia baik regional maupun internasional.

Alasan subyektif adalah keterkaitan penulis mengkaji tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masa Adam Malik, penulis ingin menelaah secara mendalam tentang tokoh Adam Malik dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia baik di tingkat regional maupun internasional, dan yang terakhir kajian tentang Adam Malik belum pernah ditulis dalam bentuk skripsi khususnya di Program Studi Sejarah Universitas Sanata Dharma.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengertian, landasan, dan tujuan politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Adam Malik?
- b. Sejauh mana keberhasilan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dan dampaknya di bidang politik dan bidang ekonomi bagi Indonesia?
- c. Bagaimana politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota ASEAN tahun 1967-1973?

C. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik tahun 1967-1973.

- b. Tujuan Khusus

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengertian, landasan, dan tujuan politik luar negeri masa Adam Malik.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dan dampaknya bagi Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota ASEAN tahun 1967-1973.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penelitian tentang politik luar negeri masa Adam Malik.
 2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
- b. Bagi Universitas Sanata Dharma
1. Penelitian ini untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 2. Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan melengkapi karya tulis ilmiah di Universitas Sanata Dharma.
- c. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berarti menyumbangkan pengetahuan baru, yang sebelumnya belum diuraikan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan itu sendiri.

E. Tinjauan Sumber

Dalam penelitian ini, tinjauan sumber diperlukan agar memenuhi standar keilmuan. Tinjauan sumber bertujuan menghasilkan tulisan yang sistematis dan obyektif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder, kedua sumber ini berupa data-data tertulis dari buku-buku yang bersangkutan dengan obyek yang diteliti.

Dalam penulisan sejarah, sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri menyaksikan peristiwa itu sendiri⁸. Sedangkan sumber sekunder adalah merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak menggunakan mata kepala sendiri atau dari seseorang yang tidak menyaksikan sendiri dalam peristiwa yang dikisahkan⁹.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : pertama, buku yang ditulis oleh Adam Malik, berjudul *Mengabdikan Republik Jilid I, II, III*, diterbitkan oleh Gunung Agung, Jakarta berisi tentang Otobiografi Adam Malik, dari ketiga buku di atas menggambarkan Adam Malik seorang yang praktis dalam berfikir dan bertindak, yang mana telah mengangkatnya menjadi seorang negarawan terhormat, di mana kepopulerannya meluas jauh sampai ke mimbar dan ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Buku ini membantu menganalisis latar belakang dari Adam Malik.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : Pertama buku yang berjudul *Hidup dan Perjuangan Adam Malik*, ditulis oleh Bachtiar Djamil, penerbit Selecta Group, Jakarta mengisahkan kehidupan Adam Malik sejak ia masih kanak-kanak, muda belia, sampai menjadi wartawan, menteri perdagangan, menteri luar negeri, duta besar, ketua DPR, dan Wakil Presiden RI, tetapi lebih menekankan pada contoh tauladan dan

⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto), Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1983, hlm. 32-33

⁹ *Ibid*, hlm. 33-34

manfaat yang hendaknya dapat diambil daripadanya. Buku ini membantu menganalisis latar belakang Adam Malik.

Kedua, buku yang ditulis oleh Solichin Salam berjudul *Adam Malik Profil Seorang Pejuang*, penerbit Gunung Jati, Jakarta berisi tentang perjuangan, pengorbanan dan pengabdian Adam Malik tanpa mengenal lelah demi majunya bangsa dan negara Indonesia, maka buku ini dapat membantu menganalisa tentang latar belakang Adam Malik.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Mohammad Hatta dengan judul *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, diterbitkan oleh Tintamas, Jakarta berisi tentang dasar politik luar negeri Republik Indonesia yaitu politik luar negeri bebas aktif, keadaan politik luar negeri dalam dunia sekarang ini, dan sikap Republik Indonesia terhadap politik netral. Sehingga buku ini dapat membantu menganalisa pengertian, landasan, dan tujuan dari politik luar negeri Adam Malik.

Keempat, buku yang berjudul *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, ditulis oleh Bantarto Bandoro, penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta berisi tentang hubungan luar negeri Indonesia yang menjadi semakin penting mengingat perubahan-perubahan internasional dewasa ini menuntut peran Indonesia yang lebih aktif dalam masalah-masalah regional atau global. Buku ini membantu untuk menganalisis keberhasilan politik luar negeri Adam Malik dengan situasi dalam negeri.

Kelima, buku yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia dibawah Soeharto*, ditulis oleh Leo Suryadinata, penerbit LP3ES, Jakarta berisi tentang

faktor-faktor utama yang telah menyumbang pada perilaku politik luar negeri Indonesia, termasuk kapasitas negara, persepsi para pemimpin utama atas masalah-masalah politik luar negeri, budaya politik yang dominan dan lembaga politik yang bertanggung jawab atas politik luar negeri. Kepribadian para perumus kebijakan juga akan disorot, terutama para pemimpin politik tingkat atas, khususnya yang bertanggungjawab atas politik luar negeri. Buku ini membantu menganalisis politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara ASEAN.

Keenam, buku yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia*, ditulis oleh Dudi Singadilaga, penerbit Alumni, Bandung berisi tentang perjalanan politik Indonesia, yang telah menggunakan berbagai cara agar Indonesia mendapat kepercayaan dengan adanya hubungan dengan luar negeri. Buku ini dapat membantu untuk menganalisa keberhasilan politik luar negeri Indonesia.

Ketujuh, buku yang ditulis oleh Michael Leifer berjudul *Indonesian Foreign Policy*, kemudian diterjemahkan oleh A. Ramlan Surbakti dalam bahasa Indonesia dengan judul *Politik Luar Negeri Indonesia*, diterbitkan oleh Grafiti, Jakarta berisi tentang benih-benih politik luar negeri Indonesia, pelaksanaannya di masa Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan haluan politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif, kemudian setelah keluarnya Supersemar mulai terlihat adanya arah baru dalam kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. Buku ini membahas peranan Adam Malik dalam pelaksanaan politik luar negeri masa orde baru terutama dikawasan Asia

Tenggara. Buku ini dapat membantu untuk menganalisa keberhasilan politik luar negeri masa Adam Malik dan dampaknya bagi Indonesia.

Kedelapan, buku yang berjudul *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, ditulis oleh Sumpena Prawirasaputra, penerbit Remaja Karya CV, Bandung berisi tentang pengertian politik luar negeri serta sumber-sumbernya, sistem politik Indonesia serta faktor-faktor yang turut menentukan perumusan politik luar negeri, dan menguraikan sejarah, landasan, tujuan dan sifat politik luar negeri Republik Indonesia serta peraturan-peraturan yang bertalian dengan politik luar negeri. Buku ini penting untuk menganalisis pengertian, landasan dan tujuan dari politik luar negeri Adam Malik.

Kesembilan, buku yang berjudul *TNI Dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, ditulis oleh Dr. Hidayat Mukmin, penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Buku ini menguraikan dan menjelaskan sebab-sebab perubahan sikap Indonesia yang semula menyetujui Proyek Federasi Malaysia sampai pada pernyataan penolakan. Buku ini membantu untuk menganalisis politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota ASEAN.

Kesepuluh, buku yang berjudul *Logika Hubungan Internasional* jilid I, II, yang ditulis oleh Walter S. Jones, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Buku jilid satu tentang Persepsi Nasional berisikan suatu analisis terhadap kasus wawasan dunia dalam sistem internasional kontemporer : Uni Soviet, Amerika Serikat, Sekutu-sekutu Barat yang besar, Cina, dan Kubu Dunia Ketiga. Buku jilid dua berisikan mengenai pemahaman kekuasaan dan

pemahaman ekonomi politik internasional. Kedua buku ini penting untuk menganalisis politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara Anggota ASEAN.

Disamping itu masih banyak buku-buku yang digunakan untuk mendukung objek yang akan diteliti, yang tidak perlu disebutkan satu-persatu.

F. Landasan Teori

Banyak pengarang yang menganalisa mengenai politik luar negeri, politik luar negeri mempunyai definisi yang beraneka ragam. Definisi itu antara lain :

B. N. Marbun mendefinisikan :

Politik luar negeri bebas aktif adalah politik luar negeri RI yang berlandaskan alinea keempat UUD 1945 yaitu bahwa pemerintah Indonesia “ Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “¹⁰.

Sumpena Prawirasaputra mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan sesuatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya¹¹.

Dudi Singadilaga mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah suatu kebijaksanaan satu negara dalam cara mengendalikan hubungan-hubungan luar negeri, sedemikian rupa sehingga

¹⁰ B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Sinar Harapan, 1996, hlm. 520

¹¹ Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Bandung, Remaja Karya CV, 1984, hlm. 7

dapat dicapai tujuan nasional yang dibebankan negara itu oleh rakyatnya¹².

M. Sabir mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain¹³.

Budiono Kusumohamidjojo mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan suatu pemerintah untuk mengatur semua hubungannya dengan kalangan luar negeri¹⁴.

Clymer Cariton Rodee mendefinisikan :

Politik Luar Negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Dia berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu¹⁵.

Suffri Yusuf mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada¹⁶.

Webster mendefinisikan :

¹² Dudi Singadilaga, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Bandung, Alumni, 1973, hlm. 2-3

¹³ M. Sabir, *Politik Bebas Aktif*, Jakarta, Masagung, 1987, hlm. 10

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm. 10

¹⁵ M. Sabir, *op. cit.*, hlm. 12

¹⁶ Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta, Sinar Harapan, 1989, hlm. 110

Politik luar negeri adalah arah dasar dari kegiatan hubungan antar negara yang berdaulat di dalam bentuk perang, damai, dan sikap netral, aliansi serta berbagai bentuk pendekatan yang terkait¹⁷.

Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila menyatakan :

Politik luar negeri adalah semua tindakan suatu negara yang mempengaruhi sikapnya terhadap negara-negara lain, kelompok maupun perhimpunan dan pakta negara-negara lain¹⁸.

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik luar negeri adalah suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah nasional yang ditujukan ke luar negeri. Maka hubungan antar negara merupakan interaksi dari berbagai kepentingan nasional.

Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri dipengaruhi bermacam-macam faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor bersifat obyektif yaitu posisi geografis, kekayaan alam, potensi penduduk, kebudayaan dan sejarah nasional. Dan sebagian lagi bersifat subyektif yaitu kondisi sosial, politik, ekonomi suatu negara dan kondisi dunia internasional pada waktu itu¹⁹. Untuk mencapai tujuan politik luar negeri, diperlukan sejumlah instrumen yaitu diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda, dan menggunakan

¹⁷ Frans S. Fernandes, *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta, Depdikbud, 1988, hlm. 34-35

¹⁸ A. Heuken, SJ, Dkk, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta, Cipta Loka Caraka, 1984. hlm. 156

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Bandung. Alumni, 1983, hlm. 153-154

kekuatan senjata. Penggunaan instrumen-instrumen tersebut hampir tidak pernah terjadi secara individual melainkan hampir selalu bersamaan²⁰

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi dan harus dibuktikan melalui data yang terkumpul²¹. Dalam kamus politik, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan²². Secara teoritis dapat diajukan hipotesis sebanyak-banyaknya sesuai dengan hakekat rasionalitas yang bersifat pluralistik. Hipotesis akan ditolak bila salah dan diterima bila fakta-faktanya membenarkan.

Maka hipotesis terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi tersebut sebagai berikut :

1. Politik luar negeri bebas aktif pertama kali dikemukakan oleh Mohammad Hatta berdasarkan UUD 1945, hal ini tercermin pada Alinea ke-1 dan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945.

Pengertian politik luar negeri yang bersifat bebas adalah politik mengenai sikapnya (Indonesia) dalam perdamaian dan ditujukan untuk memperluas dan membela perdamaian, terhadap kedua blok yang bertentangan ia tidak memihak. Ia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi pelbagai masalah

²⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *op. cit*, hlm. 57

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka cipta, 1993, hlm. 62

²² Marbun, *op. cit*, hlm. 241

internasional²³. Pengertian aktif merupakan upaya Republik Indonesia sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB²⁴.

Mengacu pada pokok pemikiran Mohammad Hatta, Adam Malik mengemukakan bahwa politik bebas aktif merupakan landasan politik luar negeri yang masih relevan sebagai landasan politik luar negeri yang berkelanjutan, landasan ini terimplementasi dalam kinerja Adam Malik ketika menjabat sebagai menteri luar negeri.

2. Adam Malik sebagai menteri luar negeri berhasil mendapatkan simpati serta kepercayaan dari negara lain untuk bekerjasama, memberikan pinjaman dan berinvestasi. Hal ini berdampak positif bagi sendi perekonomian dalam negeri.
3. Politik luar negeri Adam Malik terhadap negara anggota ASEAN adalah memberikan kebijakan kepada negara anggota ASEAN agar selalu menjaga keamanan dan perdamaian dalam melakukan kerjasama yang diharapkan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

H. Metode Dan Pendekatan Penelitian

Untuk membahas Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973 digunakan metode sejarah sebagai cara kerja, untuk menganalisis dan mensintesa bahan yang akan dikaji agar dapat di

²³ Mohammad Hatta, *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, Tintamas, 1953, hlm. 14, bisa dilihat M. Sabir dalam bukunya *Politik Luar Negeri Bebas Aktif*

²⁴ Mohammad Hatta, *Ibid*, hlm. 14

peroleh suatu kebenaran hakiki²⁵. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau rekonstruksi terhadap peristiwa masa lampau yang dilakukan secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi. Di dalam penulisan sejarah terdapat empat tahap penulisan, yaitu:

Tahap pertama, heuristik atau proses pengumpulan data yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Sumber data penelitian ini diperoleh dari literatur yang terdapat di perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan diberbagai tempat yang lain, yang berupa buku pustaka, dan majalah. Sumber primer yang digunakan yaitu *Mengabdikan Republik jilid I, II, III*. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan antara lain: *Hidup dan Perjuangan Adam Malik, Politik Luar Negeri Indonesia* dan lain-lain.

Tahap kedua, yaitu kritik sumber atau disebut juga dengan verifikasi data merupakan suatu tahap untuk melihat dan mengkaji tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat *kredibilitas* (kebiasaan di percaya)²⁶. Dalam melakukan penelitian sejarah, kritik sumber merupakan tahap yang perlu untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidak aslian atau kepalsuan dan adanya subyektifitas yang tinggi dalam suatu sumber.

Penelitian sejarah terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan kritik yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan

²⁵ Louis Gottchalk, *op. cit.*, hlm. 32

²⁶ Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1996, hlm. 99-100

misalnya sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai, dan jenis huruf yang digunakan. Sedangkan kritik intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kritik intern ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat diperoleh fakta yang merupakan unsur untuk rekonstruksi.

Kritik sumber yang dilakukan dalam penulisan ini adalah kritik intern. Dalam penulisan ini kritik ekstern tidak perlu dilakukan sebab keaslian sumber tidak perlu diragukan. Dikatakan tidak diragukan karena data-data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari dokumen-dokumen dan ensiklopedi yang sudah diuji keaslian dan kebenarannya.

Tahap ketiga, yaitu interpretasi, yang melingkupi explanasi sintesis atau analisis yang bertujuan untuk menangkap apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Dalam tahap ini dituntut untuk mencermati dan mengungkap berbagai data yang diperoleh. Oleh sebab itu, di dalam interpretasi ini perlu dilakukan analisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam kajian sejarah, sebab unsur subyektifitas dalam suatu penulisan sejarah selalu ada yang dipengaruhi oleh jiwa jaman, kebudayaan, pendidikan, lingkungan sosial dan agama yang melingkupinya²⁷.

Tahap keempat, yaitu historiografi yang merupakan langkah terakhir dalam metode penulisan sejarah. Langkah ini adalah suatu proses rekonstruksi

²⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 72

dari rentetan peristiwa-peristiwa masa lampau yang merupakan suatu totalitas perjalanan yang utuh²⁸.

Untuk menganalisa permasalahan lebih lanjut, diperlukan berbagai pendekatan ilmu-ilmu dan konsep-konsep sosial lain, maka pendekatan multidisipliner sangatlah tepat. Pendekatan multidisipliner merupakan sejumlah faktor yang akan saling berjalanan berdasarkan interaksional masing-masing. Pendekatan ini sering digunakan oleh para sejarawan dan penulis monocohe untuk menggunakannya dalam penelitian.

Penulisan skripsi ini akan ditinjau dari segi personal, politis dan ekonomis. Segi personal digunakan untuk meninjau latar belakang keluarga dan pendidikan Adam Malik. Contohnya adalah Adam Malik berasal dari keluarga kaya dan pemeluk agama Islam sehingga Adam Malik dikirim ke sekolah keagamaan.

Segi politik digunakan untuk meninjau keterlibatan Adam Malik dalam pelaksanaan politik luar negeri. Contohnya adalah Adam Malik merupakan pencetus pendirian ASEAN.

Sedang segi ekonomis digunakan untuk meninjau peran Adam Malik dalam usahanya mendukung pembentukan IGGI. Contohnya adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia yang sedang kacau dan membutuhkan suntikan dana dari para penyumbang dana. Dan akhirnya Adam Malik berhasil mengembalikan keadaan perekonomian negara Indonesia menjadi lebih teratur

Dalam menyajikan data ke dalam skripsi ini penulis akan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu dengan menguraikan peristiwa-peristiwa sejarah

²⁸ *Ibid.* hlm. 62

berdasarkan kausalitas, faktor kondisional, determinan serta dimensi ruang dan waktu²⁹.

Dalam penyajian penulisan Skripsi tentang Politik Luar Negeri Indonesia terhadap ASEAN pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973 ini, memakai sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berupa Pendahuluan, antara lain berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Sumber, Landasan Teori, Hipotesis, Metode dan Pendekatan Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengertian, landasan, dan tujuan dari politik luar negeri bebas aktif yang dilaksanakan di Indonesia menurut Adam Malik.

Bab III berisi tentang keberhasilan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dan dampaknya bagi Indonesia.

Bab IV berisi tentang politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota ASEAN.

Bab V merupakan bab simpulan. Bab ini berisi tentang simpulan dari pembahasan yang terdapat dalam bab II, III, dan bab IV. Demikianlah pendahuluan dalam penelitian dari uraian di atas dapat diamati bahwa melalui penelitian ini penulis ingin membuat suatu tulisan tentang Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973.

²⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, Jakarta, Gramedia, 1982, hlm. 70

BAB II

PENGERTIAN, LANDASAN, DAN TUJUAN

POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

MASA ADAM MALIK

A. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Politik luar negeri Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode. Pertama, masa antara 1945-1965. Dalam kurun waktu itu Indonesia mengusahakan dukungan internasional bagi eksistensi dirinya dan mengusahakan integritas bangsa. Kedua, masa 1965-sekarang, merupakan kelanjutan dari usaha-usaha terdahulu dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional yang dijabarkan dalam repelita-repelita.

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan-khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi lazim disebut kepentingan nasional³⁰.

Konsep politik luar negeri bebas aktif telah diatur dalam pembukaan. Alinea pertama UUD 1945 yang berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

³⁰ Sumpena Prawirasaputra, *op. cit*, hlm. 7

Serta alinea keempat yang berbunyi :

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dengan demikian tepatlah bila Republik Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan dan merupakan salah satu tujuan nasional. Politik luar negeri bebas aktif sendiri mencakup pengertian politik luar negeri bebas dan politik luar negeri aktif.

1. Politik Luar Negeri Bebas

Politik luar negeri bebas telah banyak dirumuskan oleh banyak tokoh dan ilmuwan. Seperti, Sumpena Prawirosaputro mengutarakan dengan jelas mengenai pengertian politik luar negeri bebas, bahwa kata bebas dalam politik luar negeri bebas aktif adalah tidak memihak dalam pertentangan barat dan timur. Kalaupun kita mengambil sikap yang kebetulan sejalan dengan pendirian salah satu blok maka hal itu disebabkan karena sikap yang kita ambil atas dasar kepentingan nasional untuk waktu dan dalam keadaan tertentu³¹.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila³².

³¹ *Ibid*, hlm. 9

³² Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit*, hlm. 7

Mohammad Hatta mengatakan bahwa politik luar negeri yang bersifat bebas adalah politik mengenai sikapnya (Indonesia) dalam perdamaian dan ditujukan untuk memperluas dan membela perdamaian. Terhadap kedua blok yang bertentangan, ia tidak memilih pihak dan mengambil jalan sendiri dalam menghadapi pelbagai masalah internasional³³. Sikap itu membawa keuntungan bagi Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang saling bertentangan serta tidak ikut dalam blok ketiga yang hanya akan menimbulkan kecurigaan dan menjurus ke pertentangan akan menyebabkan Indonesia lebih luwes bergerak di antara kedua blok tersebut dan dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak akan terikat dalam satu blok dalam melaksanakan kebijaksanaannya guna mencapai tujuan nasional.

Rumusan mengenai pengertian bebas dalam politik luar negeri bebas aktif dapat dirangkum menjadi suatu pengertian yakni bebas menjalin hubungan dengan siapa saja tanpa adanya keterikatan golongan atau blok manapun.

2. Politik Luar Negeri Aktif

Sumpeno mengatakan bahwa pengertian kata aktif dalam politik luar negeri bebas aktif adalah secara aktif menghapuskan penjajahan, memperjuangkan perdamaian dan keadilan dalam susunan internasional. Kita wajib bertindak sebagai subyek pelaku di

³³ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 14

dalam kehidupan internasional dan tidak menjadi obyek atau bulan-bulanan atau sasaran negara-negara lain³⁴. Dengan catatan sebagai subyek dalam peri hubungan internasional tidak boleh lepas dari tujuan nasional yang hendak dicapai.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif.

Pendapat serupa juga dirumuskan oleh Muhammad Hatta sebagai peletak dasar politik luar negeri bebas aktif mengatakan bahwa pengertian kata aktif merupakan upaya Republik Indonesia sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB³⁵.

Dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia mendudukan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai obyek, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional negara lain.

Kedua pengertian bebas dan aktif itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sikap bebas diperlukan untuk menunjang sikap aktif maka Indonesia bebas tetapi tidak pasif. Bebas disini

³⁴ Sumpena Prawirasaputra, *op. cit.*, hlm. 35

³⁵ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 14

berarti Indonesia tidak memihak terhadap salah satu negara yang sedang bermasalah, sedangkan aktif berarti upaya Republik Indonesia sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB. Indonesia akan menjadi negara yang dapat menjalankan perannya di dunia.

Untuk itu politik luar negeri bebas aktif ditujukan sepenuhnya sebagai alat untuk memenuhi tujuan nasional dan unsur dasar Indonesia yakni kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial hanya dapat dicapai melalui politik luar negeri bebas aktif.

Politik luar negeri Republik Indonesia dapat mengambil jalan sendiri serta inisiatif dalam menghadapi berbagai masalah internasional.

B. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Setelah mengetahui pengertian kata bebas dan aktif, selanjutnya akan dikaji landasan yang dipakai oleh politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif tidak dapat dilaksanakan tanpa landasan yang kuat. Landasan politik luar negeri bebas aktif meliputi landasan ideal, landasan struktural serta landasan operasional.

1. Landasan Ideal

Politik Luar Negeri Republik Indonesia mempunyai landasan atau dasar yang kuat karena berakar dalam falsafah Pancasila. Pancasila merupakan butir-butir dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini

menunjukkan pada Bangsa Indonesia bahwa setiap manusia tanpa memandang asal-usulnya adalah ciptaan dan hamba Tuhan yang mempunyai martabat yang sama. Untuk itu dalam mengembangkan hubungan di dalam masyarakat internasional, harus pula dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, agar terwujud kerukunan hidup antar agama dan antar umat beragama.

Kedua, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menunjukkan persepsi Bangsa Indonesia yang menolak penindasan manusia atas manusia dan penghisapan suatu bangsa oleh bangsa lain. Oleh karena itu Bangsa Indonesia selalu menentang imperialisme, kolonialisme seperti tercermin dalam UUD 1945, khususnya alinea pertama dan keempat.

Ketiga, Sila Persatuan Indonesia, yakni menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Implementasinya ke luar negeri, Indonesia menganggap bahwa setiap negara merupakan unit tersendiri serta mandiri. Negara tidak boleh merupakan sub-unit dari suatu negara lain. Dengan demikian Indonesia tidak mengenal dan menolak terwujudnya 'negara dunia' yang menundukkan negara sebagai sub-unit.

Keempat, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini mengakui

persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara itu maka tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada orang lain. Untuk itu bila diambil suatu keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, keputusan itu diusahakan secara mufakat. Untuk penerapan keluar Indonesia selalu berusaha agar masalah-masalah internasional dapat diselesaikan melalui jalan damai yakni lewat musyawarah dan mufakat. Atau dengan kata lain, Indonesia mengupayakan adanya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional.

Kelima, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Manusia Indonesia menyadari sepenuhnya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sikap itu pula yang mendasari dan memacu Bangsa Indonesia untuk selalu menolong bangsa lain yang membutuhkan. Sikap itu pula yang mendasari masuknya Indonesia ke dalam kegiatan dan organisasi internasional yang bertujuan untuk mencapai dunia yang damai.

2. Landasan Struktural

Landasan struktural politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945, baik itu pembukaan atau batang tubuh. Dalam pembukaan UUD 1945 ada dua alinea yang menjadi landasan bagi politik luar negeri

bebas aktif adalah alinea pertama yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan“. Juga terdapat dalam alinea keempat yang berbunyi “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Dari alinea tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri yang bebas aktif, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dari kungkungan penjajahan, mempererat hubungan dengan bangsa-bangsa lain dengan sama derajat, tegak sama tinggi dan duduk sama rendah³⁶. Sehingga dapat tercipta suatu masyarakat dunia yang tertib dan aman.

Selain pembukaan UUD 1945 ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan politik luar negeri juga terdapat dalam batang tubuh yakni pasal 11 yang berbunyi : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Serta pasal 13 yang menyatakan

³⁶ A. W. Widjaja, *Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm. 14

Presiden mengangkat duta dan konsul, serta Presiden menerima duta dari negara lain. Maksud duta adalah wakil negara asing yang pada umumnya bergelar duta besar. Sedangkan yang dimaksud dengan konsul adalah konsul yang menjabat kepada perwakilan konsuler.

3. Landasan Operasional

Ada tiga hal yang menjadi landasan operasional dari politik luar negeri bebas aktif yakni, TAP MPR, kebijaksanaan yang dibuat oleh Presiden (KEPPRES), serta kebijaksanaan/peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri. Pertama TAP MPR, dalam hal ini GBHN. GBHN khususnya bidang hubungan luar negeri yang setiap kurun waktu lima tahun selalu diperbaharui, pada pokoknya menyatakan bahwa Republik Indonesia terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikan pada kepentingan nasional khususnya pembangunan ekonomi akan senantiasa mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara. Sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pengembangan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan Internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional³⁷.

³⁷ *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, 1993

Kedua, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah atau presiden, sebagai seorang mandataris MPR, dalam melaksanakan tugas pemerintahan presiden dibantu oleh menteri-menteri. Bila dalam GBHN telah dijabarkan garis besar politik luar negeri, kemudian untuk pelaksanaannya presiden menjabarkan dalam bentuk KEPPRES seperti contohnya petunjuk pelaksanaan yang merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan antara lain untuk memperkuat dan mempererat kerjasama antara negara-negara dalam lingkup ASEAN, memperkuat persahabatan dan memberi isi yang lebih nyata terhadap hubungan bertentangan baik dengan tetangga-tetangga Indonesia, mengembangkan setiap unsur dan kesempatan untuk memperkokoh perdamaian dan stabilitas wilayah di Asia Tenggara, membina persahabatan dengan negara-negara di dunia pada umumnya serta mengusahakan peranan yang lebih aktif dalam memecahkan masalah-masalah dunia di lapangan ekonomi dan pola untuk memperkuat kerjasama antar bangsa-bangsa dan perdamaian dunia, bersama-sama negara-negara berkembang lainnya, memperjuangkan kepentingan bersama untuk pembangunan ekonomi³⁸.

Ketiga, kebijaksanaan/peraturan yang dibuat oleh menteri Luar Negeri. Dalam hal yang khas merupakan tugas menteri luar negeri menetapkan kebijaksanaan atas dasar petunjuk/kebijaksanaan pers. Maksudnya bahwa kebijaksanaan politik luar negeri diputuskan oleh

³⁸ Suli Soeleman, *Politik Luar Negeri Bebas Aktif*, Jakarta : Deplu RI, 1973, hlm. 3

Presiden dan menteri luar negeri hanya sebagai pelaksana yang kemudian melalui bantuan dari pers menyebarluaskan kepada masyarakat.

Ketiga landasan itulah yang dipakai sebagai dasar politik luar negeri Indonesia. Bagaimanapun juga politik luar negeri Indonesia tidak dapat bergerak begitu saja tanpa landasan dan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan.

Ketetapan MPRS No.XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia dalam pasal 4 mencantumkan pedoman perjuangannya yang didasarkan atas 4 ketentuan tersebut, yakni:

- a. Dasasila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Afrika dan Asia, perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta mengandung sifat non intervensi.
- b. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri secara Asia, dan kerjasama regional.
- c. Pemulihan kembali negara-negara lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian sesuai dengan falsafah Pancasila.

- d. Pelaksanaan dilakukan secara halus dalam pendekatan dan penanggapan, sehingga pengarahannya harus untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat³⁹.

C. Tujuan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Tujuan yang hendak dicapai politik luar negeri bebas aktif telah terumus dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat, yakni “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” tujuan yang terumus itu merupakan tujuan jangka panjang. Sedangkan tujuan jangka pendek tergantung apa yang ditetapkan untuk dicapai dalam waktu singkat.

Khusus untuk kurun waktu demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 Presiden Soekarno telah merumuskan tiga kerangka tujuan yang akan dicapai. Rumusan itu terdapat dalam pidato kenegaraannya yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1945. rumusan itu berbunyi “pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan ..., pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur ..., pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna”⁴⁰. Yang menarik dari kurun waktu ini, Presiden Soekarno dalam mewujudkan kerangka yang ketiga begitu bersemangat bahkan

³⁹ M. Sabir, *op. cit.*, hlm 27

⁴⁰ ..., *Dari Proklamasi Sampai Gesuri*, ..., Yayasan Prapantja, ..., hlm. 427

paling diutamakan, sehingga mengesampingkan kerangka pertama dan kedua.

Dalam Ketetapan MPRS No. XII / MPRS / 1966, mengenai penegasan kembali landasan kebijaksanaan luar negeri Republik Indonesia dinyatakan bahwa politik bebas aktif bertujuan :

Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan menegakkan ketiga segi kerangka tujuan revolusi, yaitu :

- a. Pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari sabang sampai merauke;
- b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur serta materiil dan spirituil dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar kerjasama membentuk suatu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna⁴¹.

Salah satu dokumen pemerintah yang paling mendekati titik kepentingan nasional itu adalah Rencana Strategi Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1964-1989) yang di dalamnya dikatakan : “ Politik

⁴¹ M. Sabir. *op. cit*, hlm. 47

luar negeri suatu negara hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional “.

Setelah mengetahui secara ringkas mengenai konsep politik luar negeri bebas aktif yang meliputi Pengertian politik luar negeri bebas aktif, landasan politik luar negeri bebas aktif, dan tujuan politik luar negeri bebas aktif. Jadi, politik luar negeri kita mendukung kepentingan bangsa melalui pembangunan. Kebijakan pemerintah telah menunjukkan hasil yang baik, misalnya Indonesia kembali menjadi anggota PBB, konfrontasi dengan Malaysia berakhir, kerjasama regional (ASEAN) terbentuk dan semakin berkembang, hubungan dengan banyak negara bertambah erat, sehingga berhasil mendapatkan kredit secara teratur demi pembangunan⁴².

⁴² A. W. Widjaja, *op. cit*, hlm. 17

BAB III
KEBERHASILAN POLITIK LUAR NEGERI
INDONESIA TERHADAP ASEAN PADA MASA ADAM MALIK
DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

Masa terakhir kepemimpinan Orde Lama ditandai dengan keputusan untuk keluar dari keanggotaan PPB serta seluruh organisasi yang bernaung di bawah badan Internasional, hal ini mengakibatkan adanya krisis ekonomi dalam negeri yang sangat parah. Dasar dari kemerosotan itu adalah dijalankan politik luar negeri yang militan dan cenderung untuk mengabaikan masalah ekonomi. Pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak ke blok komunis sempat merenggangkan hubungan Indonesia dengan Malaysia setelah adanya ide pembentukan Federasi Malaysia, yang menurut Soekarno merupakan proyek neokolonialisme.

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soekarno yang digantikan oleh Jenderal Soeharto, mempunyai cara-cara yang berbeda untuk memajukan negeri ini. Hal ini dibuktikan tidak lama setelah penyerahan Supersemar (lihat lampiran 4) dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto tanggal 11 Maret 1966, sudah ada tanda-tanda yang diperlihatkan bahwa Indonesia hendak menempuh arah baru dalam politik luar negerinya. Petunjuk awal mengenai perubahan ini dikemukakan oleh Adam Malik pada tanggal 4 April 1966 seminggu setelah ia mengemban jabatan menteri luar negeri. Dalam keterangan persnya Adam Malik menyatakan bahwa pemerintahnya akan “mempertimbangkan kembali dan mengevaluasi kembali kebijaksanaan luar

negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya dan akan dituntun oleh realitas-realitas yang ada di dunia luar”⁴³.

A. Biografi Adam Malik

1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

Adam Malik lahir di kampung keling, Pematang Siantar pada hari Minggu Pon tanggal 22 Juli 1917 bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1335 Hijriyah. Adam Malik tergolong generasi yang lahir pada masa dimana benih-benih nasionalisme Indonesia mulai tumbuh dalam bentuk organisasi-organisasi nasional yang dimulai sejak Budi Utomo tahun 1908. Mengikuti penggolongan yang lazim di Indonesia, yaitu angkatan ‘08, Angkatan ‘28, Angkatan ‘45, maka Adam Malik tergolong “generasi antara” yaitu antara generasi Angkatan ‘28 dan Angkatan ‘45⁴⁴.

Adam Malik yang bermarga Batubara, merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara dari keluarga Haji Abdul Malik, seorang pedagang yang cukup terkenal di Pematang Siantar. Ibunya bernama Siti Salamah⁴⁵, yang berasal dari Cemor, negara bagian Perak, Malaysia. Tetapi Salamah termasuk Suku Mandailing dari Tapanuli Selatan. Abdul Malik sebenarnya merupakan keturunan petani dan keluarganya merupakan pemeluk agama Islam yang Saleh. Abdul Malik memulai usaha dagangnya ketika Pematang Siantar mulai ramai dengan dibukanya perkebunan-perkebunan oleh kolonial Belanda. Tenaga-tenaga yang

⁴³ Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 165

⁴⁴ Manuel Kaisiepo, *op. cit.*, hlm. 77

⁴⁵ Solichin Salam, *op. cit.*, hlm. 7

dipekerjakan kebanyakan berasal dari Pulau Jawa dan dikontrak dengan jangka waktu tertentu. Toko yang dikelola Abdul Malik melayani berbagai kebutuhan hidup para kuli perkebunan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dagang tersebut mengantarkan keluarga Abdul Malik menjadi salah satu orang terkaya di Pematang Siantar. Sampai-sampai Abdul Malik adalah satu-satunya orang di seluruh Pematang Siantar yang mempunyai sedan Buick⁴⁶.

Dari usaha dagang ayahnya tersebut, Adam Malik remaja melihat secara langsung kehidupan para kuli kontrak yang miskin dan sengsara. Perbedaan antara kehidupan keluarganya yang serba kecukupan dengan kemiskinan kuli kontrak menyentuh perasaannya dan mempertanyakan mengapa ada realitas seperti itu. Kesaksiannya tentang kehidupan para kuli kontrak tersebut tertanam kuat dalam dirinya dan menjadi pendorong keterlibatannya dalam dunia politik selanjutnya.

Terlahir dari keluarga kaya dan pemeluk agama Islam yang saleh, Adam Malik sejak semula direncanakan orang tuanya untuk dididik sebagai santri. Setamatnya dari *Holandsche School* atau HIS, Adam Malik dikirim ke sekolah agama Parabek di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Sekolah ini terkenal dengan sebutan Madrasah Thawalib Parabek, merupakan sekolah agama yang menentang pembauran, bukan saja dalam cara dan arah pendidikan tetapi juga alam pikiran tentang pelaksanaan hukum-hukum adat. Di sekolah agama ini Adam Malik berguru pada

⁴⁶ Adam Malik, *Mengabdikan Republik Jilid I*, Gunung Agung, Jakarta, 1979, hlm. 16

Syekh Ibrahim Musa Parabek dan oleh muridnya cukup dipanggil buya parabek. Syekh Ibrahim Musa Parabek adalah seorang ulama terkenal di Minangkabau. Selain ilmu pengetahuan agama, beliau dikagumi karena kepribadiannya, mempunyai sifat lemah lembut dan teguh memegang prinsip hidup sederhana serta tidak angkuh. Pengaruh dan sifat-sifat ulama Syekh Ibrahim Musa ini tertanam dalam sifat-sifat Adam Malik yang tidak mudah goyah apalagi yang mempunyai sifat anti Tuhan dan anti agama⁴⁷. Maksudnya adalah dengan latar belakang keagamaan yang diperolehnya maka Adam Malik akan memegang teguh kepercayaan yang dianutnya yang memeluk agama Islam dan selalu percaya pada Tuhan. Dengan sifat-sifat yang dimiliki Adam Malik seperti keagamaan yang kuat, lemah lembut, teguh memegang prinsip hidup sederhana serta tidak angkuh, maka Adam Malik tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menyesatkan ajaran agama yang dianutnya. Adam Malik sering menyimak khotbah dari Haji Mochtar Lutfi dan Haji Rangkayo Rasuna Said⁴⁸. Di sekolah ini pula ia hanya sempat bertahan satu tahun karena dipaksa keluar oleh ayah dan neneknya. Kemudian Adam Malik dimasukkan ke sekolah agama Al-Masrullah di tanjung Pura, dekat Pematang Siantar yang juga tidak bertahan lama. Di sekolah ini ia berguru pada Syekh Hasyim Batangtoru dari Muhammadiyah⁴⁹.

⁴⁷ Bachtiar Djamily, *op. cit.*, hlm. 11

⁴⁸ Solichin Salam, *op. cit.*, hlm. 11

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 11

Selama belajar di sekolah-sekolah agama tersebut, Adam Malik banyak membaca surat kabar dan majalah yang memperkuat keinginan untuk terjun ke dunia politik. Kesediannya semata-mata karena ingin lepas dari perasaan tertekan setelah melihat realitas kemiskinan kuli kontrak. Ide-ide progresif yang dibacanya dari surat kabar *Pewartu Deli*, *Seruan Azhar* dan *Medan Muslim* menambah pengetahuannya tentang penjajah dan makna perjuangan menentang penjajahan⁵⁰.

Setelah sekolah di Tanjung Pura, Adam Malik tidak pernah sekolah apapun lagi. Ia dikenal sebagai orang yang otodidak. Tidak mudah untuk menjadi seorang otodidak jika tidak mempunyai kemauan yang keras, kerajinan dan ketekunan, cita-cita yang tinggi serta dasar dan asas yang kuat. Adam Malik banyak membaca berbagai jenis buku sehingga semakin menambah wawasan dan pengetahuannya. Dengan latar belakang pendidikan yang kurang begitu tinggi, ditambah kegemarannya membaca, Adam Malik bisa mengerti dan memahami bahasa Belanda, Arab, Jepang dan Inggris dengan cukup memadai untuk dapat dipergunakan dalam segala hubungan dan kegiatannya.

Sekeluanya dari sekolah Agama Al-Masrullah, Adam Malik berusaha mandiri dengan mengelola toko yang diberikan ayahnya. Toko tersebut dinamai Toko MURAH dan dijadikan alat bagi Adam Malik untuk mencapai cita-cita politiknya.

⁵⁰ Manuel Kaisiepo, *op. cit.*, hlm. 79

Di tengah-tengah perjuangan mencapai kemerdekaan, Adam Malik membina rumah tangga dengan Nelly. Pada waktu itu Adam Malik bekerja di kantor Domei mengepalai bagian Indonesia, sedang Nelly sebagai sekretaris redaksi. Nelly, keturunan Minang yang lahir di Jakarta pada 15 Mei 1925 pernah menempuh pendidikan formal yaitu HIS (Sekolah Dasar), MULO (Sekolah Menengah Pertama) dan NISVO (Sekolah Menengah Atas). Menurut Nelly, menikah dengan orang perjuangan seperti Adam Malik dibutuhkan ketabahan dan kesabaran karena sang suami sering berpergian untuk kepentingan perjuangan. Keduanya menikah pada tanggal 22 Desember 1942 dan dikaruniai lima orang anak yaitu Otto Malik, Imran Malik, Budisita Malik, Ilham Malik dan Antarini Malik.

2. Terjun dalam Pergerakan Politik

Adam Malik mengawali keterlibatannya dalam bidang politik pada usia 17 tahun sekitar tahun 1930-an di Pematang Siantar. Sejak semula Adam Malik sudah bertekad untuk terjun ke dalam pergerakan politik di mana ia bisa mengabdikan dirinya bagi perjuangan bangsanya.

Dalam awal proses sosialisasi politiknya ada dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama, realitas kemiskinan kuli kontrak yang bekerja di perkebunan-perkebunan milik Belanda. Ia mempertanyakan mengapa ada realitas seperti itu. Jawabannya ia temukan dalam satu kata : Penjajahan. Kata penjajahan sebagai konsep politik segera merasuk alam pikirannya dan mendorongnya untuk lebih memahami maknanya. Sampai

akhirnya Adam Malik mengambil keputusan untuk terjun ke dunia politik. Kedua, ide-ide progresif yang dibacanya dalam berbagai surat kabar dan majalah yang terkait pada waktu itu. Dua faktor inilah yang akhirnya membentuk kesadaran politiknya. Sebagai persiapan untuk terjun kedalam pergerakan politik selanjutnya, Adam Malik masuk Organisasi Kepanduan Hisbul Wathan. Kemudian langkahnya lebih berani dengan mendirikan cabang Indonesia Muda dan mendirikan perkumpulan Supir-supir Indonesia⁵¹.

Setelah pengalaman di dalam organisasi dirasa cukup memadai, ia kemudian mendirikan cabang PARTINDO di Pematang Siantar⁵². Partindo didirikan pada tanggal 30 April 1931 dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka⁵³, yang akan dicapai dengan jalan non kooperatif dan dengan aksi rakyat⁵⁴. Gerakan PARTINDO lebih hidup setelah Soekarno sejak tanggal 1 Agustus 1932 bergabung⁵⁵. Tetapi pada tanggal 1934

⁵¹ *Ibid*, hlm. 79

⁵² Pada waktu itu PARTINDO merupakan Partai Politik Terbesar dan usia Adam Malik baru 17 tahun ketika mendirikan cabang PARTINDO sekaligus menjadi ketuanya, bahkan kemudian membuka cabang di Medan.

⁵³ A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat, Jakarta*, 1977, hlm. 106

⁵⁴ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 283

⁵⁵ Sebelumnya Soekarno dipenjara karena kegiatannya dalam PNI yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Setelah keluar dari penjara Sukamiskin ia mendapati kenyataan bahwa PNI bubar dan timbul perpecahan dalam pergerakan nasional. Sementara itu muncul PARTINDO dan PNI-Baru. Soekarno berusaha untuk mempersatukan dua partai politik tersebut, tetapi gagal. Oleh karena itu Soekarno bergabung dengan PARTINDO yang lebih sesuai dengan ideology pribadinya dan cita-cita PARTINDO sama dengan PNI, partai yang pernah didirikannya. Lihat John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 195

pemerintah kolonial Belanda melarang dan membubarkan partai tersebut berikut semua cabangnya⁵⁶.

Pembubaran Partindo menimbulkan kekecewaan pada diri Adam Malik. Pada tahun itu juga ia pindah ke Jakarta untuk mematangkan cita-cita politiknya. Kepindahan Adam Malik ke Jakarta selain untuk memperluas cakrawala politiknya, juga dikarenakan suatu peristiwa sehubungan dengan statusnya sebagai orang bekas tahanan. Adam Malik dikenai hukuman penjara dengan tuduhan telah mengadakan perlawanan politik yang membahayakan pemerintah Belanda. Sebagai orang bekas tahanan Adam Malik merasa bahwa masyarakat sekitarnya tidak menerima kehadirannya kembali⁵⁷.

Sesampainya di Jakarta Adam Malik tinggal bersama Yahya Nasution, Seorang anggota dari Partai Republik Indonesia atau PARI⁵⁸. Dari Yahya Nasution, Adam Malik mulai mengenal Tan Malaka dengan perjuangannya. Adam Malik kemudian untuk mempelajari lebih jauh riwayat hidup dan perjuangan tokoh politik revolusioner tersebut, yang secara berangsur semua pasti telah menjadi tokoh yang paling dikaguminya. Selain Tan Malaka, Soekarno dan Hatta juga merupakan

⁵⁶ Setelah pemerintahan Belanda pada tanggal 1 Agustus 1933 mengeluarkan undang-undang yang disebut *Vergader Verbod* (larangan berkumpul) yang menginjak-injak hak asasi manusia

⁵⁷ Soebagijo, I, N, *Jagad Wartawan Indonesia*, Gunung Agung, 1978, hlm. 431

⁵⁸ PARI didirikan oleh Tan Malaka di Bangkok pada bulan Juli 1927. Inisiatif mendirikan PARI sebagian berasal dari pecekokannya dengan kaum komunis Indonesia (Peristiwa Pemberontakan PKI tahun 1927/1928) lihat Taufik Abdullah, *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, LP3ES, Jakarta, 1978, hlm. 153

guru politiknya. Namun dari ketiga guru politiknya, Adam Malik lebih dekat kepada Tan Malaka⁵⁹. Kekagumannya terhadap Tan Malaka di kemudian hari terbukti dengan garis politik yang dianutnya lebih cenderung ke kiri, di antaranya Adam Malik tergabung dalam Persatuan Perjuangan dan Partai Murba.

Setelah PARTINDO dibubarkan, didirikanlah Gerakan Rakyat Indonesia atau GERINDO pada tanggal 24 Mei 1937. Adam Malik masuk ke GERINDO dan menjadi anggota dewan pimpinan GERINDO. Tujuan dan usaha GERINDO sama dengan PARTINDO, hanya kemudian GERINDO lebih bersifat kooperatif.

Pada saat menjelang Proklamasi yang saat itu Adam Malik sebagai salah satu ujung tombak gerakan pemuda ikut menculik Soekarno-Hatta dari Jakarta ke Rengasdengklok⁶⁰. Pada tahun 1945 ini, Adam Malik tercatat sebagai anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di tahun-tahun awal republik muda ini, Adam Malik tercatat sebagai anggota Persatuan Perjuangan, pendiri sekaligus

⁵⁹ Kadang-kadang Adam Malik suka membandingkan dirinya dengan tokoh yang dikaguminya. Seperti juga Adam Malik, Tan Malaka meninggalkan negerinya menuju ke Belanda dalam usia yang sangat muda. Sekembalinya dari Belanda Tan Malaka bekerja sebagai guru di salah satu perkebunan besar di Deli. Namun Tan Malaka, seperti juga Adam Malik, tak tahan melihat kemelaratan dan kesengsaraan hidup kuli kontrak. Tan Malaka kemudian pergi ke pulau Jawa dan terlibat dalam aktivitas politik yang radikal yang akhirnya menyebabkan pembuangan ke luar negeri

⁶⁰ Adam Malik, *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*, Widjaya, Jakarta, 1975, hlm. 42-53

anggota Partai Rakyat dan pendiri sekaligus anggota Dewan Pimpinan Partai Murba⁶¹.

Menelusuri aktivitas Adam Malik dalam setiap pergerakan politik yang dijalaninya terlihat bahwa peran politiknya sejak pra-kemerdekaan ditentukan oleh garis-garis radikalisme pemuda. Sikap radikalnya semakin jelas ketika ia menjadi anggota Persatuan Perjuangan dan Partai Murba. Persatuan Perjuangan didirikan sebagai tindakan protes atas ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan diplomasi Kabinet Syahrir, namun dengan dukungan Soekarno-Hatta, Syahrir kembali memimpin kabinet.

Sebagai pengikut garis politik Tan Malaka, Adam Malik harus mengalami beberapa kali ditahan dan dipenjara karena aktivitas-aktivitasnya yang dianggap membahayakan negara. Pada waktu itu politik kiri identik dengan radikalisme, sedang kanan identik dengan konservatisme. Adam Malik menganut politik ke-kirian sehingga menyebabkan berada dalam posisi kontroversial dalam penilaian orang⁶².

Gagal dengan Persatuan Perjuangan, Tan Malaka meleburkan semua partai pengikutnya ke dalam satu wadah yakni Partai Murba. Kemudian Adam Malik masuk menjadi anggota dan Partai Murba dijadikan wadah kegiatan politiknya sampai pada masa Demokrasi Terpimpin. Keterlibatan Adam Malik dalam Partai Murba semakin menunjukkan bahwa ia menganut politik kiri dan ia dikenal luas sebagai

⁶¹ Hermawan Sulisty, "*Biografi Politik Adam Malik Dari Kiri ke Kanan*" dalam Prisma, 1992, hlm.85

⁶² Kaisiepo, *op. cit.*, hlm. 76

seorang murbaisme. Namun kemudian Partai Murba ditinggalkannya setelah dirasa partai itu tidak sejalan dengan cita-cita perjuangan yang diyakininya.

Masa awal Orde Baru adalah saat ketika politik kiri bukan saja tidak memiliki tempat dalam panggung politik Indonesia, tetapi bahkan dilumatkan dalam adu kekuasaan. Masa awal Orde Baru bagi Adam Malik merupakan titik balik terpenting dalam kesadaran politiknya, berupa kesadaran atas pilihan yang kemudian dianggapnya “keliru” dari politik kiri atau kekiri-kirian. Berlangsungnya proses pembalikan yang kemudian terbukti melalui tindakan dan peran politiknya sepanjang karir politiknya dalam pemerintahan Orde Baru⁶³.

3. Dari Wartawan ke Diplomat

Adam Malik berkenalan dengan dunia pers untuk pertama kalinya ketika menjadi ketua PARTINDO. Berkat bantuan rekannya di PARTINDO. Yakni Djauhari Salim dan Hamid Lubis, Adam Malik mulai menulis karangan dikoran Pelita Andalas⁶⁴. Kemudian ia juga menjadi wartawan dan penulis artikel di Koran Pewarta Deli dengan samaran “Kertalasari” dan menulis pokok “*Mixed Pickles*”⁶⁵. Maksudnya mengambil beberapa artikel dari majalah, koran, atau buku-buku yang kemudian di gabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk disajikan pada pembaca.

⁶³ Hermawan Sulistyono, *op. cit.*, hlm. 88

⁶⁴ Adam Malik, *Mengabdikan Republik jilid I, op. cit.*, hlm. 19

⁶⁵ Salam, *op.cit.*, hlm.38

Aktivitas Adam Malik dalam dunia pers semata-mata ditujukan untuk ikut berjuang mencapai kemerdekaan. Seperti apa yang dijelaskannya bahwa : “.....sebagai jurnalis, jelas-jelas saya memihak yaitu memihak kepada cita-cita kemerdekaan”⁶⁶.

Kegiatannya di bidang jurnalistik semakin berkembang ketika ia pindah ke Jakarta. Salah satu puncak kariernya dalam bidang ini ketika pada tanggal 13 Desember 1937, ia mendirikan kantor berita ANTARA. Ide pendirian kantor berita ini berawal ketika Adam Malik masih dipenjara *Struiswijk* akibat dituduh sebagai aktifis PARI atau Partai Republik Indonesia pimpinan Tan Malaka. Selama Adam Malik dipenjara, Tan Malaka sebagai pemimpin PARI meneruskan perjuangan PARI. Di dalam penjara itu Adam Malik bertemu dengan Pandu Kartawiguna, seorang anggota dari Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (Perpri). Keduanya sepakat mendirikan badan informasi dan untuk memudahkan langkah selanjutnya, atas nasehat seorang teman dipenjara, Adam Malik dan Pandu Kartawiguna harus menghubungi Djohan Syahruczah.

Sekeluanya dari penjara, Adam Malik dan Pandu Kartawiguna segera menghubungi Djohan Syahruczah. Proses pendirian kantor berita sempat terhalang ketika para wartawan yang lebih senior memberi reaksi tidak mendukung. Para wartawan senior tersebut antara lain Inyo Ben Goat, Sanusi Pane, Yusuf Yahya, Otto Iskandardinata, Darmono Sugondo

⁶⁶ Adam Malik, *Semua Bisa Diatur : Untaian Wicara Adam Malik 1983-1984*, LEPPENAS, Jakarta, 1984, hlm. 224

dan Adinegoro yang mengatakan bahwa mendirikan kantor berita merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah⁶⁷.

Akhirnya tanpa menghiraukan reaksi yang mengecilkan hati, diadakanlah pertemuan perdana di rumah kediaman Agus Salim, Adam Malik, Pandu Kartawiguna dan Djohan Syahrurah berembuk dalam rangka pembagian tugas antara lain untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang ada di Perguruan Rakyat seperti Sumanang dan Adam Malik, Sipahutar⁶⁸.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, kemudian diadakan pertemuan di kediaman Sumanang, yang dihadiri oleh Adam Malik, Sipahutar dan Sanusi Pane. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kantor berita yang baru didirikan dan diberi nama Kantor Berita ANTARA⁶⁹. Tanggal 13 Desember 1937 dijadikan hari berdirinya kantor Berita Antara dan pusat kegiatannya berada di *Buitentijger Straat* (tempat tinggal Yahya Nasution) atas usaha Adam Malik⁷⁰. Kehadiran ANTARA mendapat sambutan dengan cukup baik di bawah kepemimpinan empat

⁶⁷ Malik, *op. cit.*, hlm. 22

⁶⁸ Pada waktu itu Sumanang dan Sipahutar bekerjasama untuk melaporkan kegiatan-kegiatan penting seperti rapat-rapat politik, sidang Volksraad serta kegiatan-kegiatan kebangsaan waktu itu. keduanya

⁶⁹ Nama ANTARA berasal dari nama mingguan yang didirikan oleh Sumanang ketika di Bogor yaitu "Perantaraan", lihat Soebagijo I. N., *op. cit.*, hlm. 434

⁷⁰ Gedung *Buitentijger Straat* semula merupakan tempat tinggal Yahya Nasution sekaligus menjadi kantor ekspedisi "Pengharapan". Pada waktu itu Yahya Nasution masih dipenjara akibat tuduhan sebagai aktivis PARI. Yahya Nasution meninggal dunia ketika dipenjara di Boven Digul yang merupakan neraka bagi para nasionalis. *Buitentijger Straat* sekarang menjadi jalan Pinangsia.

serangkaian yaitu Adam Malik, Pandu Kertawiguna, Sumanang dan Sipahutar⁷¹. Sejak awal ANTARA telah membawa warna dan sikap sendiri, yakni warna nasionalis.

Perkembangan ANTARA diwarnai pasang surut akibat situasi politik yang masih labil. Namun ANTARA sekalipun pelan terus mendapat kemajuan, dan menjadi kantor berita bertaraf internasional. ANTARA kemudian membuka kantor perwakilannya di beberapa negara. Adam Malik mulai merintisnya dan hubungan pertama diadakan dengan *Associated Press*⁷².

Telah diperjelas di depan bahwa berdirinya kantor Berita ANTARA merupakan salah satu puncak karier Adam Malik dalam bidang jurnalistik. Aktivitas Adam Malik sebagai wartawan sangat berpengaruh terhadap perilaku politiknya, sekalipun pada saat ia menjabat sebagai wakil Presiden⁷³.

Aktivitas Adam Malik dalam bidang jurnalistik mengantarkannya kepada peran diplomatik pada tahun 1950-an ketika dilaksanakan usaha pembukaan hubungan Jepang-Indonesia yang baku setelah tahun 1945. Pada tahun 1950-an Jepang menerapkan “Politik ambil hati” pada negara-negara di Asia Tenggara, terutama negara yang menjadi bekas jajahannya

⁷¹ Menurut Siaran “ Pers dan Doevelopment Bureau ANTARA “ tanggal 15 Juli 1941, Sumanang dan Sipahutar adalah pembangun-pembangun pertama dan kemudian dilaksanakan bersama Adam Malik dan Pandu Kartawiguna. Lihat Almanak Pers “ *ANTARA, LKBN ANTAR*”, Jakarta, 1976, hlm. 131

⁷² Soebagijo, I, N., *op. cit.*, hlm. 436

⁷³ Sulistyono, *op. cit.*, hlm. 84

termasuk Indonesia. Usaha pembukaan kembali hubungan tersebut tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan perekonomian Jepang sebagai penghasil bahan baku.

Perundingan mengenai pembukaan kembali hubungan Indonesia-Jepang, terutama yang menyangkut tentang pampasan perang, dilaksanakan dari bulan September 1951 sampai bulan Desember 1957. Para perunding kemudian tergabung dalam apa yang dinamakan lobi perdamaian. Tujuannya meliputi pembayaran awal pampasan perang, membaiknya citra Indonesia terhadap Jepang dan terbentuknya hubungan spiritual antara kedua bangsa. Para perunding yang tergabung dalam lobi perdamaian berasal dari kalangan warga negara sipil dan kelompok swasta dari kedua negara⁷⁴.

Pada tahun 1954 diadakan kunjungan sejumlah wartawan Indonesia ke Jepang. Wartawan tersebut antara lain Adam Malik, Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, Ny. Supeni dan Sanjoto. Setelah perlawatan tersebut Adam Malik mulai membantu penyelesaian perdamaian Indonesia dengan Jepang walau secara tidak langsung⁷⁵. Kemudian Adam Malik sering mengadakan kunjungan tidak resmi ke Jepang yang pada akhirnya membawa hasil berupa persetujuan Presiden Soekarno dengan Parlemen⁷⁶.

⁷⁴ Masashi Nishihara, *The Japanese and Sukarno's Indonesia*. (a. b. Suli Suleiman). Ratna Sari Dewi Soekarno dan *Pampasan Perang : Hubungan Indonesia-Jepang 1951-1966*, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 86

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 92

⁷⁶ Kaisiepo, *op. cit.*, hlm. 86

Pengalaman diplomatik ini kemudian diikuti oleh tugas diplomatik resmi ketika pada akhir tahun 1959 Adam Malik diangkat menjadi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Pada mulanya Adam Malik menolak ketika Presiden Soekarno menunjuknya karena merasa tidak mempunyai pengetahuan tentang diplomasi dan tentang negara Uni Soviet⁷⁷.

Sejak itu Adam Malik semakin mengukuhkan dirinya sebagai diplomat yang berpengaruh dan seringkali disertai tanggungjawab berunding dalam masalah-masalah politik yang rumit, misalnya dalam perundingan-perundingan untuk membicarakan pengembalian Irian Barat yang pada waktu itu masih dikuasai Belanda. Pada tahun 1963 Adam Malik memegang jabatan sebagai menteri perdagangan, disusul kemudian menjadi menteri koordinator untuk pelaksanaan Ekonomi Terpimpin pada tahun 1965 dan menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno ia menjabat sebagai Waperdam merangkap Menteri Luar Negeri ad Interium. Dalam kabinet Ampera I dan II Adam Malik (lihat lampiran 6) masih dipercaya sebagai menteri luar negeri, dan pada awal pemerintahan ORBA Adam Malik kembali dipercaya sebagai menteri luar negeri sejak Juni 1968 sampai tahun 1977⁷⁸.

⁷⁷ Namun ada yang menganggap bahwa pengangkatan Adam Malik sebagai Dubes merupakan usaha PKI “ menyingkirkan “ Adam Malik dari percaturan politik nasional demi keuntungan PKI. Hal ini bisa dimengerti karena Adam Malik salah seorang pendiri dan pemimpin partai Murba yang merupakan warisan Tan Malaka. Basis politik Tan Malaka berseberangan dengan PKI tahun 1927. Lihat Bachtiar Djamily, *op. cit.*, hlm. 60

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 60

Kemajuan karier Adam Malik di bidang diplomasi dicapai bukan tanpa kerja keras, mengingat ia adalah seorang otodidak. Kegemarannya membaca terbukti menambah pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya di samping kemampuan intelektualnya yang cukup tinggi. Kepribadiannya yang menonjol adalah sikap sederhana dan rendah hati. Ia selalu dinamis dan berpikir positif. Pembawaan khasnya adalah selalu mengambil keputusan dengan cepat dan jarang meleset. Adam Malik terkenal dengan ucapannya “ semua bisa diatur “ yang mempunyai makna selalu memberikan harapan bahwa tidak ada suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi. Untuk memahami falsafah hidupnya itu dapat ditelaah lewat pernyataannya di bawah ini :

“ Semua sukses dalam hidup pertama-tama harus didasarkan pada kepercayaan bahwa kita dapat berbuat apapun juga yang kita kehendaki. Akan tetapi kepercayaan tersebut harus didukung dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa semua orang akan membantu kita. Dan buat rakyat yang dipercaya terhadapnya, bahwa semuanya itu tergantung pada Tuhan. Bahwa kita tidak pernah melupakannya juga, walaupun setiap menit dari kehidupan kita”⁷⁹.

Dengan falsafah hidupnya itu Adam Malik menjalani setiap jabatan yang dipercayakannya dengan penuh optimisme dan penuh kejujuran. Pengabdianya didasari dengan kehidupan religinya yang

⁷⁹ Solichin Salam, *op. cit.*, hlm. 90-91

mendalam, yang didapatnya sewaktu menimba ilmu di sekolah Agama Parebek dan Tanjung Pura.

B. Keberhasilan Adam Malik dalam usaha normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia.

Konfrontasi Indonesia merupakan salah satu dari peristiwa politik yang paling bergejolak di Asia Tenggara setelah perang dunia. Konfrontasi ini hampir mengakibatkan perang terbuka. Keadaan tersebut ditambah dengan adanya pertentangan pribadi antara Soekarno dengan Tunku Abdul Rahman dan Soekarno dengan Macapagal. Keadaan tersebut menyebabkan setiap upaya kearah rujuk mengalami hambatan.

Upaya rujuk tidak hanya timbul dari kedua negara yang bersengketa, tetapi pihak ketiga ada yang menawarkan diri untuk menjadi mediator. Sebagai contoh adalah Jepang yang memulai berperan dalam penyelesaian konfrontasi sebagian dari keterlibatannya dengan Indonesia melalui pampasan perang⁸⁰. Sejak tahun 1945 dan seterusnya Jepang mulai menerapkan politik “ambil hati” kepada para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pertimbangan Jepang menawarkan diri sebagai mediator lebih bersifat ekonomis. Jepang berharap agar pampasan perang akan membawanya ke

⁸⁰ Peran Jepang sebagai mediator dalam masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia dibagi menjadi tiga periode yaitu periode Pra-Malaysia dari tanggal 20 Januari – 16 September 1963; periode Pasca Malaysia dari tanggal 16 September 1963 – 30 September 1965 dan periode sesudah G 30S/ PKI dari tanggal 30 September 1965 – 11 Agustus 1966. Lihat Masashi Nishihara, “ *The Japanese and Soekarno's Indonesia* ” (a. b. Dean Party R). *Soekarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang : Hubungan Indonesia-Jepang 1951-1966*. Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 172

pasar ekspor yang menguntungkan di negara Indonesia dan negara bekas jajahannya di wilayah Asia Tenggara.

Jepang sebagai mediator berhasil mempertemukan Soekarno dengan Tunku Abdul Rahman di Tokyo dalam bulan Mei dan Juni 1963 dan pertemuan Soekarno-Tunku Abdul Rahman-Macapagal di Manila dalam bulan Juli dan Agustus 1963. Pertemuan-pertemuan tersebut dalam prosesnya mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan⁸¹.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat karena didorong oleh tiga faktor. Pertama, adanya disintegrasi dalam federasi akibat lemahnya struktural pemerintahannya. Kedua, digagalkannya pemberontakan G30S/PKI di Indonesia dengan digantinya pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Ketiga, adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan konfrontasi tanpa mediasi pihak ketiga.

Upaya penyelesaian konfrontasi lebih transparan setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Soeharto sebagai pengemban Supersemar mengambil langkah dengan membubarkan PKI dan membersihkan PKI sampai ke akar-akarnya. Pada tanggal 27 Maret 1966, Soeharto mengangkat Adam Malik sebagai Menteri luar negeri. Adam Malik kemudian melakukan reorganisasi dan restrukturisasi dalam kementerian Luar Negeri sekaligus membersihkannya dari anasir PKI serta melakukan langkah-langkah

⁸¹ Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri : Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, Pustaka Harapan, Jakarta, hlm. 106

diplomatik ke beberapa tetangga. Pada tanggal 30 Maret 1966 Adam Malik mengatakan bahwa Indonesia akan berupaya keras untuk mengakhiri konfrontasi, meskipun Presiden Soekarno tetap menghalangi. Langkah-langkah menuju perundingan lebih lancar dengan bantuan diplomasi Jepang yang kebetulan merupakan teman lama Adam Malik semasa bergabung dalam Lobi Perdamaian yang membahas masalah pampasan perang.

Peranan Adam Malik dalam menghentikan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yaitu dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi dalam kementerian luar negeri, sehingga dapat mendukung usaha damai yang diadakan Indonesia, kemudian memberantas pemberontakan yang dilakukan oleh PKI sampai ke akar-akarnya, dan yang terakhir mengadakan perundingan dengan Malaysia untuk menuju perdamaian tanpa merugikan kedua belah pihak.

Pada tanggal 8 Mei 1966 Tun Abdul Rasak mengumumkan bahwa Malaysia siap untuk mengadakan pembicaraan perdamaian dengan Indonesia tanpa bantuan pihak ketiga, kemudian pada tanggal 12 Mei Adam Malik menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan pihak ketiga dalam upaya normalisasi.

Pembicaraan kemudian dilanjutkan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1966 di Bangkok. Perundingan Bangkok merupakan perundingan formal tingkat pertama para pejabat Indonesia dan Malaysia untuk membicarakan prinsip-prinsip normalisasi hubungan. Dalam perundingan ini Adam Malik menyetujui hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia tanpa prasyarat

penentuan pendapat umum sebelumnya di Sabah dan Serawak⁸². Hasil persetujuan ini ditentang oleh Presiden Soekarno dan Adam Malik dianggap telah berkapitulasi⁸³.

Pemerintah Malaysia pada tanggal 7 Juni 1966 telah menyetujui perundingan tersebut. Walaupun masih mengandung masalah dasar, pemerintah Indonesia baru menerima hasil Perundingan Bangkok pada tanggal 30 Juli 1966 setelah beberapa kali diadakan pertemuan di antara pihak Indonesia dan Malaysia.

Pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta ditandatangani suatu persetujuan akhir yang memungkinkan menjalin hubungan diplomatik normal antara Indonesia dan Malaysia (lihat lampiran 5). Persetujuan normalisasi hubungan kedua negara ditandatangani oleh menteri luar negeri Adam Malik dan Waperdam Tun Abdul Rasak di gedung Departemen Luar Negeri di Taman Pejambon Jakarta bertempat di ruang Pancasila⁸⁴. Sikap Soekarno terhadap penandatanganan Persetujuan Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966 adalah awalnya tidak setuju karena Ia mempunyai masalah pribadi dengan Tunku Abdul Rahman. Presiden Soekarno pernah mengalihkan tugas, untuk memulihkan Hubungan Indonesia dengan Malaysia, yang semula dipercayakan

⁸² *Ibid*, hlm. 136

⁸³ Dalam sidang KOGAM pada tanggal 8 Juni 1966. Presiden Soekarno mengalihkan tugas, untuk memulihkan hubungan Indonesia-Malaysia, yang semula dipercayakan pada Adam Malik kemudian diserahkan kepada Soeharto. Presiden Soekarno menganggap Adam Malik sebagai seorang yang mudah menyerah dan sedikit banyak karena Soekarno sering mendapat kritik terbuka dari Adam Malik.

⁸⁴ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 325

pada Adam Malik kemudian diserahkan kepada Soeharto. Presiden Soekarno menganggap Adam Malik sebagai orang yang mudah menyerah dan sedikit banyak karena Soekarno sering mendapat kritik terbuka dari Adam Malik.

Inti Persetujuan Jakarta tersebut adalah bahwa kedua negara sepakat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Sabah dan Serawak untuk menegaskan kembali keputusan yang telah diambil sebelumnya tentang keikutsertaannya ke dalam Federasi Malaysia melalui pemilihan umum yang bebas demokratis. Selain itu konflik kedua negara akan dihentikan dan kedua pemerintah setuju untuk segera memulihkan hubungan diplomatik⁸⁵. Dengan ditandatanganinya Persetujuan Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966 berakhirlah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dimulai sejak tahun 1963.

C. Keberhasilan Adam Malik dalam Pembentukan ASEAN

1. Keberhasilan Adam Malik dalam Deklarasi Bangkok

Terjadinya perubahan politik di Indonesia mengubah pula sifat hubungan politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Soeharto selaku ketua Presidium Kabinet Ampera menyatakan untuk menciptakan kerjasama regional seperti tersirat dalam pernyataan berikut :

“Dengan ini kita akan dapat menghidupkan gagasan Maphilindo dalam lingkungan yang lebih besar, agar dapat tercapai suatu Asia Tenggara yang bekerjasama di berbagai bidang, terutama ekonomi, teknik, dan kebudayaan. Dengan demikian pula pelaksanaan prinsip anti kolonialisme-imperialisme di Asia Tenggara lebih dimantapkan lagi, karena dengan suatu Asia Tenggara yang terintegrasikan, akan terbinalah benteng dan pangkalan yang paling ampuh dan kuat untuk

⁸⁵ Mukmin, *op.cit*, hlm. 139

menghadapi imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun”⁸⁶.

Berdasarkan instruksi Presidium Kabinet Ampera (lihat lampiran 9), menteri luar negeri Adam Malik mengusulkan dibentuknya suatu perhimpunan kerjasama regional di Asia Tenggara.

Pada tanggal 5-8 Agustus 1967 diadakan sidang para menteri tentang pembentukan organisasi di kawasan Asia Tenggara. Sidang tersebut diselenggarakan di Bangkok dan dihadiri oleh negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Adam Malik menyatakan bahwa organisasi yang akan dibentuk harus bersifat non politik dan militer. Karena Adam Malik ingin mewujudkan tujuan nasional Indonesia yaitu Perdamaian.

Dalam penentuan nama bagi organisasi ini Adam Malik mengusulkan nama yaitu *Association of South East Asian Nations* yang disingkat ASEAN, dan nama itu disepakati oleh semua anggota organisasi tersebut. Dilihat dari namanya ASEAN dibentuk bukan sebagai pakta pertahanan. ASEAN juga bukan dibentuk sebagai kekuatan kontra bagi komunisme di Asia Tenggara.

Setelah melalui proses pembahasan, akhirnya berhasil disusun suatu komunique bersama yang dikenal sebagai “Deklarasi Bangkok” atau “Deklarasi ASEAN“. Jadi ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi

⁸⁶ Sudibyo (Ed.), *ASEAN dalam Berita, Harapan dan Kenyataan 1967-1977*, CSIS, Jakarta, 1976, hlm. 12

Bangkok yang bertujuan untuk mengadakan kerjasama regional di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. “Deklarasi Bangkok” ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh wakil dari lima negara di Asia Tenggara, Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narsisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura dan Thanat Khoman dari Thailand (lihat lampiran 7).

Selain menetapkan “Deklarasi Bangkok”, sidang juga memutuskan agar *Standing Committee* pertama bersidang di Jakarta untuk merumuskan proyek-proyek ekonomi yang akan dilaksanakan oleh ASEAN. Dengan berhasil dirumuskannya “Deklarasi Bangkok” dimulailah babakan baru kerjasama regional Asia Tenggara⁸⁷.

Telah dijelaskan di atas bahwa ASEAN bukan merupakan pakta pertahanan mengingat kegagalan konsep pakta pertahanan sebelumnya bagi Asia Tenggara. Adam Malik serta para pendukungnya berhasil menyakinkan Presiden Soeharto untuk menentang haluan agar ASEAN menjalankan peranan militer. Adam Malik memahami kerawanan negara tetangga Indonesia yang menyadari bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan dominan dalam persekutuan militer apapun. Adam Malik juga menyadari kecenderungan negatif dalam tanggapan beberapa negara donor, terutama dari Amerika Serikat, melihat gejala “ekspansionisme”

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 5-6

Indonesia⁸⁸. Adam Malik menginginkan ASEAN sebagai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Untuk menindaklanjuti pembentukan ASEAN, maka Indonesia memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Malaysia dan Singapura. Pulihnya diplomatik tersebut merupakan suatu kemenangan diplomasi Adam Malik. Adam Malik berhasil membelokkan politik Soekarno yang berdasarkan poros Peking-Hanoi-PhnomPenh-Jakarta sekaligus mengoreksi kesalahan-kesalahan politik idealismenya Soekarno di masa lampau⁸⁹.

2. Keberhasilan Adam Malik dalam ASEAN 1967-1977

Pada awal berdirinya ASEAN menghadapi banyak masalah di antara negara anggotanya. Masalah Sabah muncul dan menimbulkan ketegangan antara Malaysia dan Filipina. Adam Malik menyatakan bahwa Indonesia tidak ingin ikut campur tangan dalam sengketa Sabah, akan tetapi apabila kedua belah pihak mencari tempat berunding maka Jakarta terbuka seluas-luasnya.

⁸⁸ Ketakutan akan gejala “ ekspansionisme ” Indonesia kemungkinan berawal dari pernyataan Wakil Panglima AD Letnan Jendral M. Panggabean pada akhir tahun 1966 yang menyatakan; “ perlu untuk membentuk sebuah organisasi pertahanan bersama bagi negara-negara di Asia Tenggara karena usaha-usaha Cina untuk memperbesar pengaruhnya di bagian dunia ini “ dan “ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus...mampu bergerak ke negara tetangga manapun yang membutuhkan bantuan pertahanan. “ Lihat Harold Crouch, “ *The Army and Politics* “ Terj. Sumartana, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, hlm. 379-380

⁸⁹ Sudibyo (Ed.), *op. cit.*, hlm. 16

Pada periode ke II ASEAN muncul masalah baru yaitu “ Affair Singapura “ pada bulan Oktober 1968 mengakibatkan hubungan antara Indonesia-Singapura menjadi tidak harmonis. Isi dari Affair Singapura adalah ada dua prajurit KKO Indonesia, kopral KKO Harum bin H. M. Ali dan sersan II KKO Usman bin Said alias Tahir, yang telah ditugaskan selama masa konfrontasi dan telah ditahan sejak tahun 1965 di penjara Changi Singapura telah dijatuhi hukuman mati gantung oleh pemerintahan Singapura. Kedua prajurit tersebut dipersalahkan telah meledakkan bom di dalam kota sehingga menyebabkan tiga orang menjadi korban. Terhadap keputusan ini Indonesia melalui surat menteri luar negeri Adam Malik bulan Juni 1968 telah memintakan keringanan hukuman. Atas permintaan keringanan tersebut, menlu Singapura S. Rajaratnam dalam suratnya tertanggal 9 Oktober 1968 telah menyatakan penolakannya.

Sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 6-8 Agustus 1968. Sidang memilih Adam Malik sebagai ketua sidang menggantikan Thanat Khoman. Kemudian sidang selanjutnya diadakan di Kuala Lumpur tahun 1969. Satu keputusan lagi yaitu pembentukan komite ad hoc masalah keuangan sesuai dengan proyek ASEAN⁹⁰. Dalam perkembangannya negara-negara ASEAN memerlukan suasana yang aman dan damai. Pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971 membuat sebuah deklarasi yang dikenal dengan sebutan “ Deklarasi Kuala Lumpur “

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 46

atau “ Deklarasi ZOPFAN “ (*Zona of Peace, Freedom and Neutrality*). Isi pokok pernyataan itu adalah keinginan untuk menjadi Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas, dan netral, yang bebas dari campur tangan pihak luar dan terus memperluas kerjasama antara negara-negara anggota sebagai prasyarat bagi memperkuat kekuatan, kesetiakawanan dan keakraban antar negara di Wilayah Asia Tenggara⁹¹. Deklarasi tersebut mewujudkan tekad serta keputusan ASEAN untuk memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara serta untuk tetap menjaga kebebasan kawasan tersebut dari segala bentuk dan campur tangan kekuatan-kekuatan dari luar kawasan.

Pada sidang tahunan ke VII di Jakarta pada tanggal 7-9 mei 1974, Adam Malik kembali menjadi ketua sidang. Sidang menghasilkan suatu komunique tentang liberalisasi perdagangan dan setuju untuk mengadakan kerjasama industri ASEAN. Didorong oleh kepentingan-kepentingan politik dan keamanan di Asia Tenggara, para kepala pemerintah negara ASEAN sepakat mengadakan pertemuan Tingkat Tinggi.

Pertemuan Tingkat Tinggi atau dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pertama kali diadakan di Bali tanggal 23-25 Februari 1976. KTT I-ASEAN tersebut menghasilkan dua pernyataan yaitu *Declaration of ASEAN concert* (Deklarasi kesepakatan ASEAN) dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Traktat persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara) yang menyatakan untuk lebih

⁹¹ Syamsumar Dam dan Riswandi, *op. cit*, hlm. 76

meningkatkan kerjasama regional ASEAN di bidang politik dan ekonomi⁹².

Sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN yang diselenggarakan di Manila tanggal 24-26 Juni 1976 menghasilkan dua deklarasi yaitu *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* dan *ASEAN Declaration for Mutual Assistance on Natural Disasters*. Sedang pada sidang tahunan di Manila pada tanggal 24 Februari 1977 berhasil menandatangani *the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements* (Pengaturan Perdagangan Preferensi ASEAN)⁹³.

KTT-II ASEAN dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 1977 di Kuala Lumpur. Empat hari kemudian, tanggal 8 Agustus 1977, ASEAN genap berusia 10 tahun. Selama satu dasawarsa itu, ASEAN banyak mengalami perkembangan. Ditegaskan pula bahwa ZOPFAN perlu segera direalisasikan dan perlu adanya peningkatan kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra wicara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Masyarakat Eropa di Selandia Baru.

Selama satu dasawarsa ASEAN, Adam Malik berperan aktif dalam setiap proses perkembangannya. Terlepas dari berbagai kendala dan kekurangannya, ASEAN telah berhasil menjadi organisasi regional alternatif di kawasan Asia Tenggara yang terbukti membawa kemajuan

⁹² Adam Malik, *op. cit*, hlm. 88

⁹³ Sudibyo, *op. cit*, hlm. 181

bagi anggotanya. Ketika Adam Malik diangkat menjadi wakil presiden, berarti ia tidak berkecimpung lagi dalam ASEAN, ia merasa berat karena ia merupakan salah satu pendiri ASEAN dan ikut merawat selama satu dasawarsa. Jelaslah bahwa peran Adam Malik dalam ASEAN telah memberi arti bagi kemajuan organisasi tersebut.

3. Keberhasilan Adam Malik dalam Pembentukan IGGI

Pemerintahan Orde Lama meninggalkan sejumlah masalah, yang paling pokok adalah hutang luar negeri dalam jumlah yang besar sehingga mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi goncang. Kritik mengenai kebijaksanaan politik luar negeri dan kebijaksanaan ekonomi orde lama mulai bermunculan. Mereka menyarankan pada pemerintah agar memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah-masalah ekonomi. Menurut Ali Wardana, salah seorang anggota kelompok intelektual itu menyatakan bahwa “pendekatan produksi yang diterapkan pemerintah akan berhasil jika dilengkapi dengan pendekatan moneter”⁹⁴.

Para ekonom UI memberi advis kepada pemerintah Orde Baru untuk menanggulangi masalah ekonomi di Indonesia dengan meminta bantuan kepada luar negeri. Karena tidak ada jalan lain yang lebih baik.

Jika kepemimpinan Orde Lama menutup sejarahnya dengan mengabaikan bantuan dari luar negeri, maka kepemimpinan orde baru memulai sejarah dengan membutuhkan kredit dari luar negeri. Pada

⁹⁴ Ali Wardana, “*Masalah Inflasi di Indonesia*”, dalam Widjojo Nitisastro, *Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-Faktor IPOLSOS*, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Jakarta, 1965, hlm. 49

tanggal 4 April 1966, Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mengumumkan kesediaan Indonesia untuk menerima bantuan luar negeri asal tidak disertai dengan ikatan politik⁹⁵.

Berdasarkan peraturan 3 Oktober 1966 paling tidak terdapat 5 aspek penting yang menjadi strategi pemerintah untuk mengatasi kemerosotan ekonominya⁹⁶. Dilaksanakannya program stabilisasi ekonomi oleh pemerintah untuk memulai pembangunan ekonomi Indonesia yang mengalami keguncangan. Pertemuan pertama diadakan di Tokyo bulan September 1966 antara Indonesia dengan negara-negara kreditor dari Barat dan Jepang⁹⁷. Hasil dari pertemuan itu adalah dicapainya kesepakatan di antara negara-negara kreditor bahwa pada prinsipnya Indonesia membutuhkan penjadwalan kembali pembayaran hutang-hutang luar negerinya. Kemudian pertemuan kedua diadakan di Paris pada bulan September.

⁹⁵ Michael Leifer, *op. cit*, hlm. 167-168

⁹⁶ Lima aspek tersebut adalah kebijaksanaan anggaran belanja seimbang untuk menghilangkan defisit anggaran belanja yang menyebabkan merajalelanya inflansi; kebijaksanaan luar negeri lebih memberikan kemudahan bagi para eksportir; kebijaksanaan penundaan pembayaran hutang-hutang luar negeri dan mencari kredit luar negeri jangka panjang serta bunga yang rendah; kebijaksanaan kredit yang ketat dan yang terakhir kebijaksanaan mengundang penanaman modal asing. Lihat Sjahrir, *Basic Needs in Indonesia, Economics, Politics and Statement Policy, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore*, 1986, hlm. 13-14

⁹⁷ Negara-negara kreditor yang hadir adalah Amerika Serikat, Belanda, IMF dan Australia masing-masing diwakili oleh sebuah delegasi, sedangkan Kanada, Selandia Baru dan Swiaa hadir sebagai peninjau dalam pertemuan itu.

Uni Soviet menuntut agar Indonesia membayar hutang-hutangnya sesuai perjanjian pada masa orde lama tetapi Indonesia tidak dapat memenuhi karena memang Indonesia tidak sanggup dan meminta agar diberi kelonggaran. Pada tanggal 23 Februari 1970 dalam pertemuan antara Adam Malik dengan Andrei Gromyko (menteri luar negeri Uni Soviet) telah dikemukakan posisi Indonesia yang masih belum mampu membayar hutangnya. Tetapi Uni Soviet tetap bertahan agar Indonesia segera membayar hutangnya.

Delegasi Indonesia Adam Malik mengharapkan supaya penjadwalan kembali hutangnya mempergunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh negara-negara kreditor Barat di Paris tanggal 24 April 1970. Akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1970 Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dengan Uni Soviet tentang penjadwalan kembali hutang-hutang luar negeri Indonesia sesuai dengan syarat-syarat hasil Pertemuan Paris tersebut⁹⁸.

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diselenggarakan pertemuan kedua di Amsterdam yang mencapai kesepakatan untuk membentuk *Inter-Governmental Group on Indonesia* atau IGGI, suatu konsorsium internasional negara-negara Barat sebagai penyumbang dana bagi Indonesia. Anggota IGGI adalah Amerika Serikat, Australia, Belgia, Belanda, Inggris, Italia, Jepang, Jerman Barat, Kanada, dan Perancis.

⁹⁸ Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri, *Duapuluh Lima Tahun Deplu 1945-1970*, Pertjetakan Offset Kawal, Jakarta, 1971, hlm. 316

Lembaga-lembaga keuangan internasional yang menjadi anggota adalah Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Asia dan Lembaga Pembangunan Internasional. Negara-negara peninjau adalah Australia, Denmark, Norwegia, Selandia Baru dan Swiss⁹⁹.

Antara Indonesia dengan negara-negara IGGI terdapat kesepakatan bahwa satu pihak menerima bantuan, sementara itu pihak lain memberikan pinjaman dengan tiga prinsip dasar yang telah disetujui :

“... pertama, bantuan atau pinjaman itu harus dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, bantuan itu harus dapat memberikan kemampuan membayar kembali hutang-hutang sebelumnya. Ketiga, bantuan yang diberikan harus dapat memperkuat posisi keuangan sehingga Indonesia mampu membayar kembali hutang-hutang yang diadakan”¹⁰⁰.

Di Indonesia, terbentuknya IGGI menimbulkan reaksi pro dan kontra. Banyak kritikan dan tuduhan kepada pemerintah yang menyatakan bahwa sikap Orde Baru kepada IGGI itu adalah menjual Indonesia secara berkomplot. Kemudian Adam Malik berusaha menghadapi kritik dan tuduhan dengan jalan memberi keterangan mengenai hubungan Indonesia dengan IGGI dihadapan para wartawan Indonesia. Adam Malik menyatakan bahwa betapa parah dan sukarnya kedudukan ekonomi Indonesia memikul warisan hutang Orde Lama. Selanjutnya Adam Malik menyatakan :

“ Kesediaan kita menerima bantuan melalui IGGI itu, merupakan bukti niat kita untuk membangun secara jujur dan mereka yang memberi hutang dapat pula diyakinkan bahwa kita bersedia membayar hutang

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 314

¹⁰⁰ M. Sabir, *op.cit*, hlm. 205

2. Dalam bidang ekonomi :

Dengan dibentuknya IGGI sebagai lembaga bantuan luar negeri bagi Indonesia dapat dianggap sebagai perwujudan nyata dan keberhasilan usaha-usaha Indonesia untuk memulihkan kepercayaan luar negeri terhadap dirinya. Dengan IGGI, maka Indonesia dapat memperbaiki keadaan ekonomi yang telah hancur dan kembali menyusun perekonomian negara dengan baik.



BAB IV

**POLITIK LUAR NEGERI ADAM MALIK TERHADAP NEGARA-
NEGARA ANGGOTA ASEAN TAHUN 1967-1973**

A. Politik Luar Negeri Adam Malik Terhadap Malaysia

1. Kebijakan Adam Malik dalam bidang politik dan ekonomi

a. Bidang Politik

Berdasarkan pada segi keamanan Indonesia mengadakan hubungan politik bertetangga baik tanpa memandang sistem politik yang dianut negara lain, asalkan negara-negara ini menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.

b. Bidang Ekonomi

Adam Malik melihat bahwa perekonomian di Indonesia sedang mengalami krisis moneter, dengan demikian Adam Malik mengambil kebijakan untuk mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Bangsa Indonesia menawarkan atau memberi peluang kerjasama pada Malaysia untuk menanamkan modal di Indonesia. Karena Adam Malik mengetahui bahwa perkembangan perekonomian Malaysia sangat pesat. Dengan demikian kedua belah pihak mendapat keuntungan dari hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi.

2. Hambatan politik luar negeri Adam Malik terhadap Malaysia

a. Konfrontasi antara Indonesia-Malaysia

Hubungan Indonesia-Malaysia merupakan saudara Tua dan Muda. Indonesia memiliki kecenderungan bertindak sebagai saudara tua dan menginginkan diperlakukan seperti itu. Tentu saja kepentingan ekonomi, budaya dan sistem politik yang berbeda adalah sama-sama penting, tetapi faktor-faktor tersebut tidak dapat untuk menerangkan beberapa tingkah laku politik luar negeri Indonesia terhadap Malaysia.

Pembentukan Federasi Malaysia diharapkan dapat dibentuk dan terdiri dari Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Timbulnya gagasan pembentukan federasi Malaysia sebenarnya adalah gagasan dari P.M. Tunku Abdul Rahman, walaupun ini tidak original, karena sebelum Malaya memperoleh kemerdekaan dari Inggris pernah pula Ibrahim Jacub, seorang tokoh Partai Nasionalis Malaya mengemukakan gagasan itu.

Federasi dirasakan sangat perlu oleh Malaya dalam rangka mengatasi masalah-masalah internal, terutama masalah kependudukan yang tidak seimbang dan masalah ekonomi. Dalam beberapa kesempatan kunjungan ke Malaysia dan berdialog dengan beberapa tokoh Malaysia, Adam Malik memperoleh kesan yang kuat adanya rasa antipati terhadap suku Cina di Malaysia dan Singapura yang mayoritas penduduknya adalah keturunan Cina.

Keseimbangan penduduk tidak hanya penting dari segi demografik saja tetapi juga dilihat dari segi politis, dimana diharapkan agar partai-partai politik yang menentukan kebijaksanaan pemerintah nantinya

juga tidak dikuasai oleh golongan minoritas Cina¹⁰². dilihat dari kepentingan ekonomi, Malaya yang hanya kaya akan karet, timah dan kelapa sawit, dalam federasi nantinya diharapkan akan bertambah kokoh ekonominya dengan dukungan posisi Singapura sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa, serta Brunai yang kaya akan minyak bumi.

Ditinjau dari segi eksternal terutama dari segi pertahanan keamanan, penggabungan daerah-daerah tersebut dalam suatu federasi akan menyederhanakan sistem pertahanan keamanan, karena federasi dapat dikelola bersama sebagai suatu unit strategi.

Dengan demikian lahirnya gagasan pembentukan federasi Malaysia sebenarnya merupakan gagasan yang positif dan cukup rasional. Hanya proses pematangan dan realisasi gagasan ini karena dilaksanakan terburu-buru menimbulkan kesan politik bagi Indonesia tentang adanya desakan dari pihak luar. Disamping itu pertimbangan yang lemah di dalam federasi sendiri.

Dari hasil penjajagan yang dimuat dalam *Report of the Commission of Inquiry, North Borneo and Serawak* tahun 1962. Dari laporan ini antara lain diketahui adanya suara pro dan kontra pembentukan federasi. Laporan antara lain menyebutkan bahwa sepertiga penduduk menyetujui tanpa syarat, sepertiga lainnya menyetujui dengan syarat agar kepentingan daerah terjamin, sedang yang sepertiga lagi terbagi suara menjadi dua. Sebagian ingin tetap terus dibawah pemerintahan Inggris, dan

¹⁰² Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 86

sebagian ingin memperoleh kemerdekaan terlebih dahulu sebelum bergabung dalam federasi.

Indonesia menentang pembentukan federasi, karena menurut anggapannya federasi adalah gagasan Inggris dan bukan gagasan rakyat Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Inggris dianggap sebagai negara kolonialis dan imperialis baru, yang mengepung Indonesia dari utara. Dalam salah satu pidatonya, yakni di Seskoad Bandung pada Tanggal 11 Juli 1963, Bung Karno antara lain menyatakan:

“Dibentuknja Malaysia oleh Tunku Abdul Rachman dan pihak Inggris bagi kita adalah merupakan konfrontasi terhadap revolusi Indonesia, konfrontasi terhadap keselamatan kita dan terhadap tjita-tjita jang sedjak lama hendak kita laksanakan”¹⁰³.

Dalam menetapkan kebijaksanaan konfrontasi terhadap federasi Malaysia, Indonesia menempatkan diri dalam posisi yang sulit. Angkatan bersenjata baru saja selesai melaksanakan tugas yang berat untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Tanpa diberikan waktu cukup untuk mengkonsolidasikan diri, ABRI sudah dihadapkan pada tugas baru yang tidak ringan, yakni konfrontasi. Kebijaksanaan konfrontasi terasa disenafaskan dengan kebijaksanaan merebut Irian Barat, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1965, adalah :

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 91

“Kita melaksanakan Trikora tanpa collapse, tanpa runtuh dan hasilnjapun gilang-gemilang. Kita melaksanakan Dwikora tanpa collapse, tanpa runtuh, dengan hasilnja sekarang “Malaysia” sudah lebih daripada 50% hantjur lebur berantakan sama sekali”¹⁰⁴!

3. Penyelesaian politik luar negeri Adam Malik terhadap Malaysia

a. Penyelesaian Konfrontasi antara Indonesia-Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat karena didorong oleh tiga faktor. Pertama, adanya desintegrasi dalam federasi akibat lemahnya struktural pemerintahannya. Kedua, digagalkannya pemberontakan G 30S/PKI di Indonesia dan digantinya pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Ketiga, adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan konfrontasi tanpa mediasi pihak ketiga.

Pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta ditandatangani suatu persetujuan akhir yang memungkinkan penjalinan hubungan diplomatik normal antara Indonesia dan Malaysia. Reaksi Presiden Soekarno pertamanya tidak setuju tapi dengan melihat keadaan Indonesia yang semakin memburuk dalam hal ekonomi dan berusaha memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara tetangga maka Presiden Soekarno memperbaiki sikapnya. Persetujuan diplomasi kedua negara ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Waperdam Tun Abdul Razak di gedung

¹⁰⁴ Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1965, *Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno Pada Tanggal 17 Agustus 1965*, Djakarta

Departemen Luar Negeri di Taman Pejambon Jakarta bertempat di ruang Pancasila¹⁰⁵ (lihat lampiran 8).

Inti persetujuan Jakarta tersebut adalah bahwa kedua negara sepakat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Sabah dan Serawak untuk menegaskan kembali keputusan yang telah diambil sebelumnya tentang keikutsertaannya ke dalam federasi Malaysia melalui pemilihan umum yang bebas demokratis. Selain itu konflik kedua negara akan dihentikan dan kedua pemerintah setuju untuk segera memulihkan hubungan diplomatik¹⁰⁶. Dengan ditandatanganinya Persetujuan Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966 berakhirilah Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dimulai sejak tahun 1963.

B. Politik Luar Negeri Adam Malik Terhadap Singapura

1. Kebijakan Adam Malik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya

a. Bidang Politik

Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, oleh karena itu Adam Malik menginginkan hubungan kerjasama dengan Singapura berjalan dengan baik dan saling menjaga keamanan bangsa bersama.

b. Bidang Ekonomi

Singapura di antara kelima negara anggota ASEAN mempunyai kedudukan tersendiri karena tidak merupakan produsen bahan mentah

¹⁰⁵ Bibit Suprpto, *op. cit.*, hlm. 325

¹⁰⁶ Mukmin, *op. cit.*, hlm. 139

hasil perkebunan pertanian melainkan hanya memproduksi jasa dengan mengolah bahan-bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. Dengan keadaan seperti itu Adam Malik mulai berfikir untuk bekerjasama dengan Singapura yaitu Indonesia menyediakan bahan mentah untuk diproduksi dan Singapura yang mengolahnya menjadi bahan setengah jadi.

c. Bidang Sosial-Budaya

Adam Malik mengenal Singapura kaya akan tempat pariwisata, demikian juga Indonesia yang mempunyai banyak tempat pariwisata. Adam Malik berpendapat bahwa kecenderungan dunia kini mengarah kepada pembentukan kesatuan-kesatuan ekonomi dan masa depan negara hanya dapat dijamin dengan mengusahakan sumber-sumber perekonomian secara bersama.

2. Hambatan politik luar negeri Adam Malik terhadap Singapura

Hubungan bilateral Indonesia-Singapura saat ini terus berkembang baik, terutama karena adanya konsultasi antara pemimpin nasional tertinggi dan pejabat kedua negara, kunjungan-kunjungan rombongan kesenian dan olah raga dari Indonesia-Singapura, dan Singapura ikut menggabungkan pulau Batam menunjukkan keinginannya untuk lebih mempererat hubungan antara kedua negara agar lebih konkrit dalam jangka panjang. Walaupun demikian masih terdapat hambatan-hambatan yang pada hakikatnya bersumber pada kepentingan nasional masing-masing dan perbedaan dalam prioritas antara Singapura dengan

Indonesia sehingga negara dagang dan industri maju dapat memperluas kekuasaannya seperti Indonesia yang sedang membangun di segala bidang.

Faktor penghambat lainnya lebih berdasarkan kesulitan psikologis, di mana masih terdapat rasa kecurigaan dalam masyarakat kedua negara terhadap satu sama lain. Masalah yang sampai sekarang masih belum teratasi ialah masalah penyelundupan yang nampaknya sukar dicarikan penyelesaiannya karena perbedaan penilaian terhadap penyelundupan itu erat kaitannya dengan masalah penyelundupan adalah seretnya usaha mengadakan perjanjian ekstradisi.

3. Penyelesaian politik luar negeri Adam Malik terhadap Singapura

Dalam menyelesaikan permasalahan antara kedua negara, Indonesia harus memperbaiki sikapnya dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Dalam menyelesaikan masalah industri Adam Malik menciptakan wilayah perdagangan bebas dan memberlakukan tarif bea masuk bagi negara-negara pedagang yang datang melalui pelabuhan. Hubungan Indonesia dengan Singapura selanjutnya berjalan saling beriringan dan saling memperbaiki masalah masing-masing serta menumbuhkan rasa saling percaya terhadap Singapura. Dengan adanya kepercayaan tersebut kedua negara dapat membina hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

C. Politik Luar Negeri Adam Malik Terhadap Pilipina

Kebijaksanaan politik luar negeri Adam Malik dalam bidang politik dan ekonomi

a. Bidang Politik

Adam Malik melaksanakan politik luar negerinya berdasarkan prinsip saling menghormati satu sama lain. Dan selalu menjaga keamanan dalam negeri.

b. Bidang Ekonomi

Adam Malik mengadakan kerjasama dengan Pilipina dengan harapan Pilipina mau menanamkan modalnya ke Indonesia. Sehingga perekonomian Indonesia dapat berjalan lancar, tidak mengalami krisis moneter lagi. Pada hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Pilipina tidak terdapat hambatan yang begitu berarti. Karena kedua negara telah menyadari bahwa dengan mengadakan hubungan kerjasama maka mereka harus saling percaya satu sama lain.

D. Politik Luar Negeri Adam Malik Terhadap Thailand

Kebijaksanaan politik luar negeri Adam Malik dalam bidang politik dan ekonomi.

a. Bidang Politik

Adam Malik dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri, kepentingan nasional akan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan utama dan dengan berpegang pada prinsip persahabatan dengan semua negara atas dasar persamaan, keutuhan wilayah dan saling menghormati kedaulatan masing-masing tanpa memandang sistem pemerintahan dan ekonomi.

b. Bidang Ekonomi

Adam Malik membuka kesempatan kepada Thailand untuk bergabung menanamkan modalnya di Indonesia dengan persyaratan yang telah disepakati bersama kedua belah pihak. Persyaratannya adalah bahwa pihak Thailand harus membayar pajak yang telah ditentukan oleh Indonesia. Pada hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Thailand tidak terdapat hambatan yang begitu berarti. Karena kedua negara telah menyadari bahwa dengan mengadakan hubungan kerjasama maka mereka harus saling percaya satu sama lain.

Jadi politik luar negeri Adam Malik terhadap negara anggota ASEAN dapat dilihat dalam kinerja Adam Malik yang menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Karena Indonesia ingin mewujudkan tujuan nasional yaitu perdamaian diantara negara-negara tetangga.

BAB V

PENUTUP

1. Pengertian, landasan, dan tujuan politik luar negeri bebas aktif pada masa Adam Malik adalah politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Pengertian bebas adalah politik mengenai sikapnya (Indonesia) dalam perdamaian dan ditujukan untuk memperluas dan membela perdamaian, terhadap kedua blok yang bertentangan ia tidak memihak. Ia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi pelbagai masalah Internasional. Pengertian aktif merupakan upaya Republik Indonesia sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB.

Landasan politik luar negeri bebas aktif meliputi landasan ideal yaitu Pancasila, landasan struktural terdapat dalam UUD 1945 alinea pertama dan keempat, dan landasan operasional yang terdapat dalam TAP MPR, Kebijakan yang dibuat oleh Presiden, serta Kebijakan yang dibuat oleh menteri luar negeri. Sedangkan tujuan politik luar negeri bebas aktif tercantum pada UUD 1945 khususnya alinea keempat.

Pada tahun 1950-1965, sering terjadi inkonsistensi bahkan terjadi penyelewengan. Penyelewengan yang terjadi yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, yang berusaha menghancurkan pemerintahan Indonesia. Selain itu juga terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, dan yang terakhir keadaan yang kurang stabil karena keadaan perekonomian yang memprihatinkan.

Politik luar negeri Indonesia adalah memperjuangkan perdamaian dunia, kemerdekaan semua bangsa, anti kolonialisme dan imperialisme, anti rasialisme dan nonblok terhadap negara-negara besar. Dengan adanya prinsip-prinsip di atas maka Indonesia mudah untuk menjalin hubungan baik dengan negara manapun

2. Keberhasilan politik luar negeri terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dan dampaknya di bidang politik dan bidang ekonomi bagi Indonesia adalah Adam Malik sebagai menteri luar negeri berhasil mendapatkan simpati serta kepercayaan dari negara lain untuk bekerjasama, memberikan pinjaman dan berinvestasi. Hal ini berdampak positif bagi sendi perekonomian dalam negeri.

Adam Malik berhasil menyelesaikan normalisasi hubungan Indonesia Pertama, adanya dengan Malaysia dalam waktu relatif singkat karena didorong oleh tiga faktor. disintegrasi dalam federasi akibat lemahnya struktural pemerintahannya. Kedua, kegagalan pemberontakan G30S/PKI di Indonesia, adanya pergantian pemerintahan lama ke pemeritahan baru.

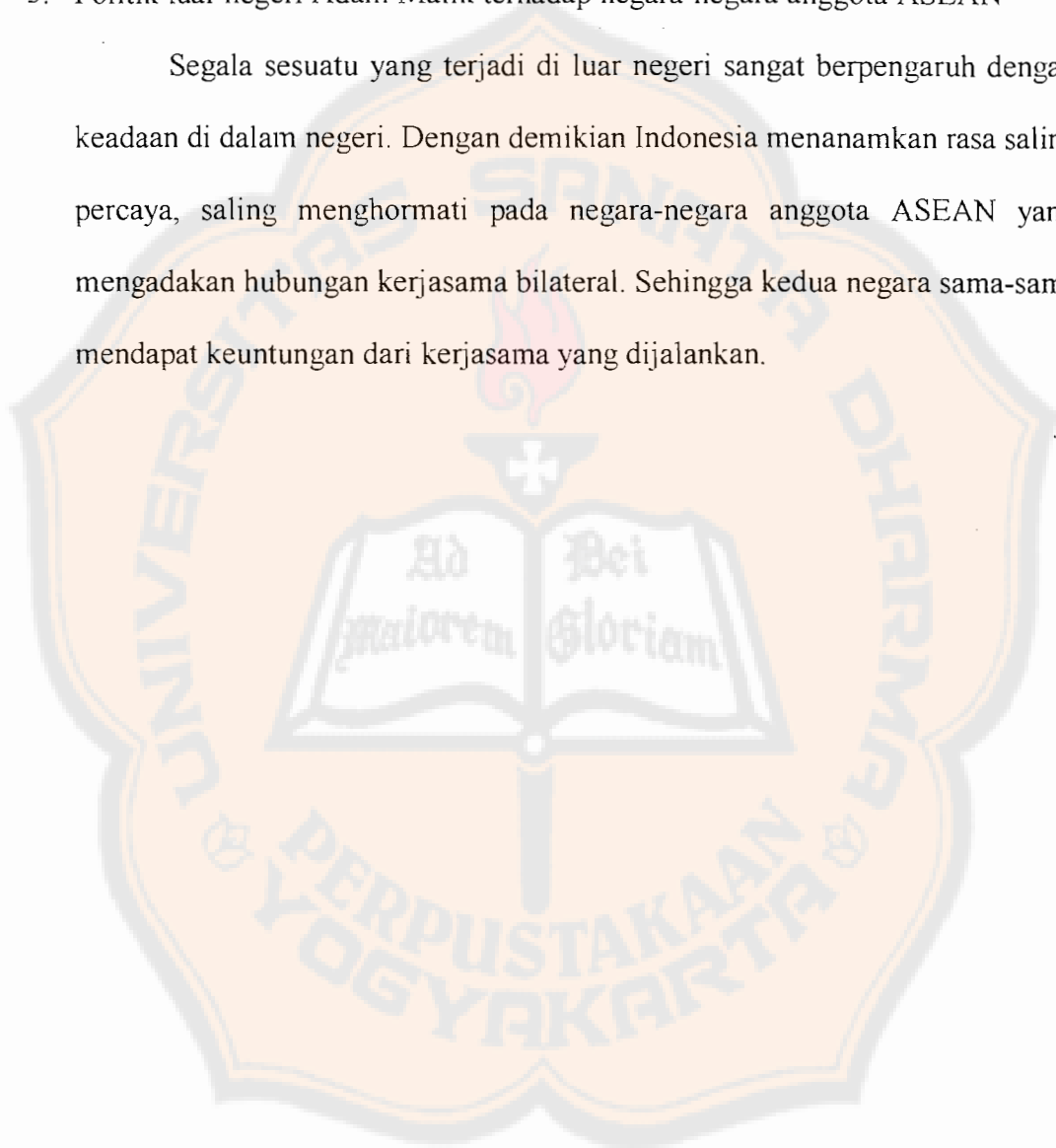
Ketiga, adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan konfrontasi tanpa pihak ketiga.

Adam Malik membentuk ASEAN yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok yang bertujuan untuk mengadakan kerjasama regional di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Untuk menindaklanjuti pembentukan ASEAN, maka Indonesia memperbaiki hubungan diplomatiknya. Adam Malik juga berhasil memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang hancur. Dengan adanya IGGI Indonesia mempunyai

peluang untuk mendapatkan bantuan secara teratur dalam pelaksanaan pembangunannya, dan memulihkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia.

3. Politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota ASEAN

Segala sesuatu yang terjadi di luar negeri sangat berpengaruh dengan keadaan di dalam negeri. Dengan demikian Indonesia menanamkan rasa saling percaya, saling menghormati pada negara-negara anggota ASEAN yang mengadakan hubungan kerjasama bilateral. Sehingga kedua negara sama-sama mendapat keuntungan dari kerjasama yang dijalankan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Malik.,
1979. *Mengabdikan Republik jilid I*. Jakarta : Gunung Agung
- Bachtiar Djamily.,
1980. *Hidup dan Perjuangan Adam Malik*. Jakarta : Selecta Group
- Bibit Suprpto.,
1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta :
Ghalia Indonesia
- Budiono Kusumohamidjojo.,
1987. *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analitis*. Bandung : Bina
Cipta
- Departemen Penerangan RI.,
1965. *Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno Pada Tanggal 17 Agustus
1965*.Djakarta
- Dudi Singadilaga.,
1973. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Bandung : Alumni
- Fernandes, Frans. S.,
1988. *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu
Pendekatan Sejarah*. Jakarta : Depdikbud
- Gottschalk, Louis.,
1986. *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto). Jakarta :
Universitas Indonesia Press
- Heuken, SJ, A, Dkk.,
1984. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta :
Cipta Loka Caraka
- Hidayat Mukmin.,
1991. *TNI Dalam Politik Luar Negeri : Studi Kasus Penyelesaian
Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta : Pustaka Harapan
- Kuntowijoyo.,
1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya
- Marbun, B. N.,
1996. *Kamus Politik*. Jakarta : Sinar Harapan

- Leifer Michael.,
1989. *Indonesian Foreign Politic*, (terj. A. Ramlam Surbakti). Jakarta : Gramedia
- Mochtar Kusumaatmadja.,
1983. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Bandung : Alumni
- Mohammad Hatta.,
1953. *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : Tintamas
- Panitya Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri.,
1971. *Duapuluh Lima Tahun Deplu 1945-1970*. Jakarta : Pertjetakan Offset Kawal
- Rizal Sukma.,
1994. "Hubungan Indonesia-Republik Rakyat Cina : Jalan Panjang Menuju Normalisasi" dalam Bantarto Bandoro(Ed.), *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta. CSIS
- Sabir, H. M.,
1987. *Politik Bebas Aktif*. Jakarta : Masagung
- Sartono Kartodirdjo.,
1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia
-
1982. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta : Gramedia
- Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia,
ASEAN Selayang Pandang, 1982
- Sjahrir.,
1986. *Basic Needs in Indonesia, Economic, Politics and Statement Policy*, *Institute of Southeast Asian Studies*. Singapore
- Solichin Salam.,
1978. *Adam Malik Profil Seorang Pejuang*. Jakarta : Gunung Jati
- Sudibyoy.,
1976. *ASEAN Dalam Berita, Harapan dan Kenyataan 1967-1977*. Jakarta : CSIS

- Suffri Yusuf.,
1989. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Jakarta : Sinar Harapan
- Suharsimi Arikunto.,
1993. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suli Suleiman.,
1973. *Politik Luar Negeri Bebas Aktif*. Jakarta : Deplu RI
- Sumpena Prawirasaputra.,
1984. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Bandung : Remaja Karya
- Sumartono.,
1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan
- Syamsumar Dam dan Riswandi.,
1995. *Kerjasama ASEAN : Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*. Jakarta : Ghalia
- Widjaja, A. W.,
1986. *Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif*. Jakarta : Bina Aksara
- Widjojo Nitisastro.,
1965. *Masalah-Masalah Ekonomi dan Faktor-Faktor IPOLSOS*. Jakarta : Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional
- Majalah**
Prisma. No. 11 Tahun XIII.1984

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Lampiran

Lampiran 1 Silabus

Silabus

Nama Sekolah : SMA
 Mata Pelajaran : Sejarah Nasional dan Umum
 Kelas / Semester : 2 / IV
 Alokasi Waktu : 4 x 45 (2 pertemuan @2 x 45 menit)
 Pendekatan : SAL dan Berbasis kerja keompok
 Metode : Studi pustaka, observasi, presentasi dan diskusi

Standar Kompetensi	Kemampuan menganalisa pelaksanaan politik luar Negeri Indonesia
Kompetensi dasar	Mendiskripsikan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik tahun 1967-1973
Materi Pokok	Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973

<p>Uraian Materi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian, landasan, dan tujuan politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Adam Malik 2. Siswa mampu menjelaskan keberhasilan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dan dampaknya bagi Indonesia 1967-1973 3. Siswa mampu menjelaskan politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota ASEAN tahun 1967-1973
<p>Indikator dan pencapaian hasil belajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, landasan, dan tujuan politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Adam Malik 1967-1973 2. Keberhasilan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dan dampaknya bagi Indonesia 1967-1973 3. politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota

	ASEAN 1967-1973
Pengalaman belajar	<p>1. Pengalaman belajar di luar kelas</p> <p>a. Melalui studi pustaka (buku, Koran, dan majalah) yang berhubungan dengan politik dalam negeri Indonesia, negara dan pemerintahan, politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik 1967-1973</p> <p>b. Sebelum siswa melaksanakan tugas, guru membagi kelompok antara lain dalam kelompok politik dalam negeri Indonesia, kelompok negara dan pemerintahan di Indonesia, kelompok politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik 1967-1973</p> <p>c. Tugas siswa dalam lembar kerja diantaranya berisikan :</p> <p>(1). a. Judul laporan : Politik luar negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam</p>

	<p>Malik 1967-1973</p> <p>b. Isi laporan singkat :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengertian, landasan, dan tujuan politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Adam Malik 1967-1973• Keberhasilan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dan dampaknya bagi Indonesia 1967-1973• Politik luar negeri Adam Malik terhadap negara-negara anggota ASEAN 1967-1973 <p>c. Kesimpulan : politik luar negeri adalah suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia Internasional</p>
--	--

	<p>untuk mencapai tujuan nasional. Jadi pada hakekatnya politik luar negeri merupakan pencerminan demi kepentingan nasional yang ditujukan keluar negeri</p> <p>(2). a. Judul laporan : Politik dalam negeri Indonesia</p> <p>b. Isi laporan singkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang politik dalam negeri Indonesia • Usaha-usaha yang dilakukan dalam negeri Indonesia • Dampak politik dalam negeri Indonesia <p>c. Kesimpulan : Politik dalam negeri merupakan suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional.</p>
--	--

	<p>(3). a. Judul laporan : Negara dan Pemerintahan di Indonesia</p> <p>b. Isi laporan singkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar terbentuknya Negara dan pemerintahan di Indonesia • Tujuan dari pembentukan Negara dan pemerintahan di Indonesia • Dampak dari terbentuknya Negara dan pemerintahan Indonesia <p>c. Kesimpulan :</p> <p>Pembentukan negara dan pemerintahan tidak akan terlepas dari perasaan nasionalisme, maka pemerintahan yang bertanggungjawab harus berdasarkan landasan konstitusional kenegaraan.</p> <p>2. Pengalaman di kelas</p> <p>a. Apersepsi (15 menit)</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kesiapan tugas yang akan didiskusikan untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa. • Guru memberikan pertanyaan tentang kesiapan siswa dalam pengerjaan laporan tiap kelompok dengan meminta penjelasan pada setiap kelompok. <p>b. Kegiatan inti (2x75 menit)</p> <p>Jawaban secara analisis memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil kelompok secara bergantian dari kelompok I sampai III, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Dalam diskusi kelompok ini dapat ditarik suatu dasar penilaian siswa terhadap topik yang ada sehingga dapat menjadi</p>
--	--

tolak ukur penilaian dari keaktifan dan kejelian dalam memberikan pertanyaan dari temen yang lain. Setelah berbagai proses dinamika pengajaran yang tertampung dalam diskusi selesai, guru memberikan penyempurnaan hasil diskusi secara menyeluruh dengan memberikan pemahaman reflektif dari materi diskusi yang telah dipresentasikan.

c. Penutup (15 menit)

Kesimpulan yang dilakukan oleh guru sebagai moderator dan fasilitator dengan menyatakan bahwa kebenaran merupakan awal dari pembuktian berdasarkan sumber data yang kredibel.

- 1) Latar belakang munculnya negara dan pemerintahan didukung dengan adanya nasionalisme yang tinggi, dan untuk menuju pemerintahan

	<p>yang bertanggungjawab berdasarkan landasan konstitusional kenegaraan.</p> <p>2) Usaha yang dilakukan oleh Adam Malik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ia merubah sistem politik di Indonesia sehingga menjadi negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar.</p> <p>3) Kesimpulan : politik luar negeri Adam Malik tidak akan berjalan semestinya, kalau tidak didukung oleh semua elemen bangsa untuk mengedepankan eksistensi Indonesia secara konsisten, dan dilandasi integritas kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila.</p>
<p>Sumber / Bahan / Alat Pembelajaran</p>	<p>1. Buku-buku karangan Adam Malik</p>



• Adam Malik, 1979, *Mengabdikan Republik jilid I, II, III*, Jakarta, Gunung Agung

2. Buku-buku yang membahas tentang Adam Malik

• Bachtiar Djamil, 1980, *Hidup dan Perjuangan Adam Malik*, Jakarta, Selecta Group.

• Solichin Salam, 1978, *Adam Malik Profil Seorang Pejuang*, Jakarta, Gunung Jati

3. Buku-buku tentang perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan dinamika perpolitikan dalam pemerintahan.

• Michael Leifer, 1989, *Indonesian Foreign Politic*, (terj. A. Ramlan Surbakti), Jakarta, Gramedia

• Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*,

	<p>Bandung, Alumni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohammad Hatta, 1953, Dasar Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, Tinta Mas • Hidayat Mukmin, 1991, TNI Dalam Politik Luar Negeri : Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Jakarta, Pustaka Harapan • Dudi Singadilaga, 1973, Politik Luar Negeri Indonesia, Bandung, Alumni • Suffri Yusuf, 1989, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Jakarta, Sinar Harapan <p>4. Alat : Foto-foto Adam Malik dengan beberapa tokoh nasional lainnya, yang berperan dalam menumbuhkan politik luar negeri Indonesia.</p>
--	--

Lampiran 2

Penilaian atau Evaluasi :

A. Penilaian proses belajar

Alat penilaian : Skala Nilai

Bentuk : Format penilaian

Kegiatan yang diamati	orientasi	Mengemukakan kerjasama	Mempresentasikan hasil	Mengajukan pertanyaan	Menjawab pertanyaan	Memberikan tanggapan	Tanya jawab	dst	Jumlah score	keterangan
Nama										

Keterangan : 4 = Sangat baik

3 = baik

2 = Cukup

1 = Kurang

B. Penilaian hasil belajar

Alat penilaian : tes

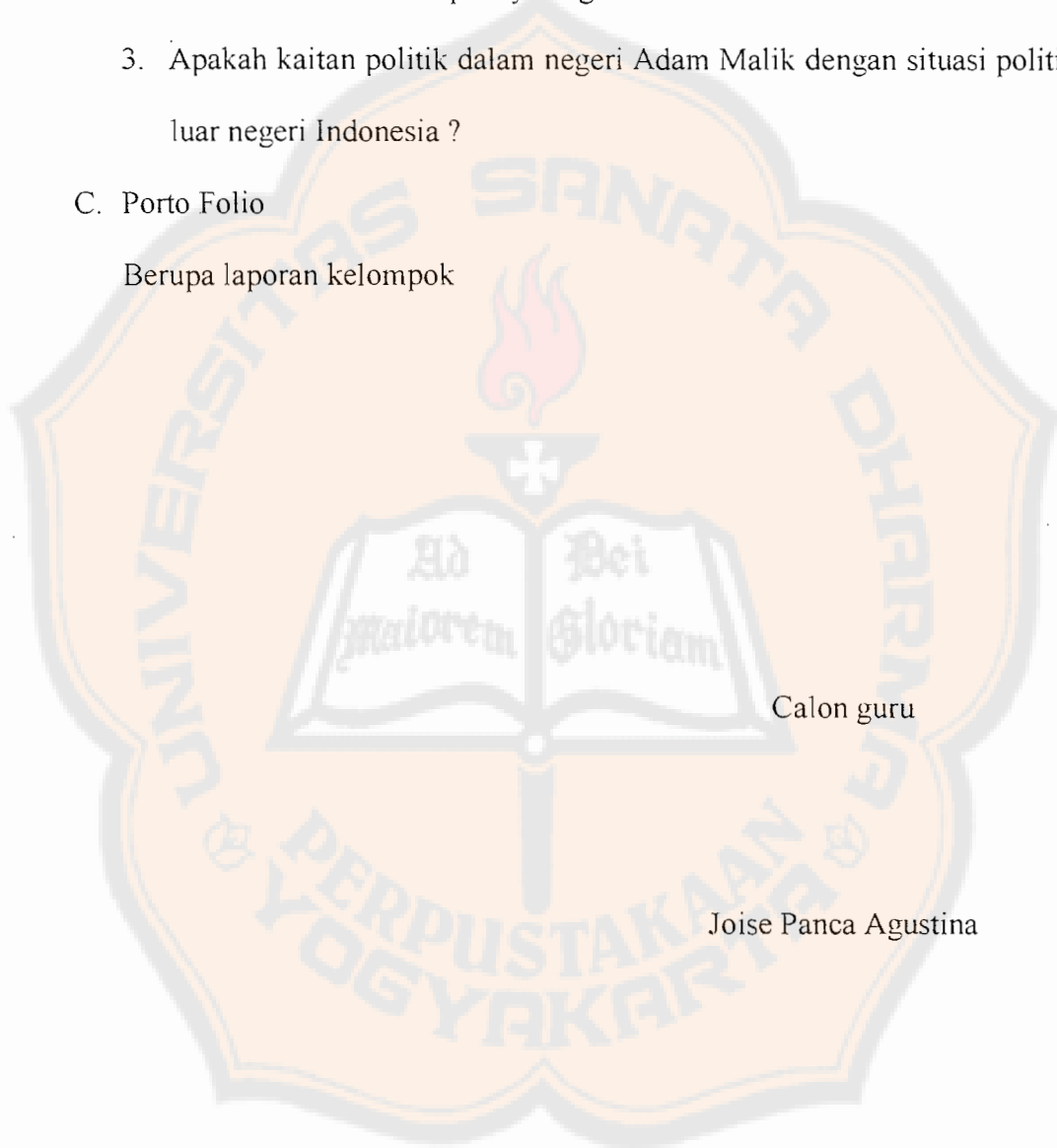
Aalt tes : Essai berstruktur

Butur-butir tes :

1. Bagaimana pengertian, landasan ,dan tujuan politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Adam Malik?
2. Sejauh mana politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pada masa Adam Malik dan dampaknya bagi Indonesia ?
3. Apakah kaitan politik dalam negeri Adam Malik dengan situasi politik luar negeri Indonesia ?

C. Porto Folio

Berupa laporan kelompok



Calon guru

Joise Panca Agustina

Lampiran 3

Uraian Materi

Adam Malik dilahirkan di Kampung Keling, Pematang Siantar pada hari Minggu Pon tanggal 22 Juli 1917 bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1335 Hijriyah. Dengan jenjang pendidikan yang tidak begitu tinggi dan beberapa pengalaman keorganisasian yang berorientasi pada pembentukan Indonesia merdeka, telah mendorongnya untuk tetap konsisten dalam membentuk dan memperjuangkan terwujudnya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat melalui pendidikan politik. Dasar ini mulai terbentuk semenjak Adam Malik mendirikan cabang PARTINDO di Pematang Siantar yang berorientasi pada penciptaan kader-kader penerus bangsa yang bertanggung jawab dan tidak tergantung terhadap pemimpin. Perjuangan Adam Malik tidak sia-sia karena merupakan tokoh dibalik suksesnya pembentukan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Adam Malik sebagai menteri luar negeri, mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hilang dari negara-negara Internasional. Adam Malik mulai berusaha merubah system politik di Indonesia dengan memperbaiki hubungan kerjasama diplomatic dengan negara-negara Internasional. dengan demikian diharapkan kepercayaan dari negara-negara Internasional yang dulu hilang mulai memberikan kepercayaan kembali kepada Indonesia. Hal ini menguntungkan bagi perkembangan Indonesia di kemudian hari, karena bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi.

Perubahan tersebut perlu didukung dengan penerapan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang mengacu pada penciptaan hubungan saling menguntungkan tanpa tekanan pengaruh, sehingga dapat mendukung politik diplomasi dalam meraih pengakuan kedaulatan yang didukung oleh tentara yang professional. Dasar pembentukan politik luar negeri Indonesia mengalami ancaman yaitu adanya krisis ekonomi akibat penyelewengan pada orde lama. Dengan diselesaikannya berbagai ancaman diatas dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dalam meraih pengakuan kedaulatan Adam Malik melakukan kerjasama untuk memberdayakan perbedaan yang dimiliki dalam mengedepankan politik diplomasi, melalui penciptaan kepercayaan terhadap rakyat, dengan didukung pembenahan dalam berbagai sektor untuk mencapai kemandirian ekonomi, dengan didukung penghematan keuangan negara.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia kestabilan perekonomian dan politik tidak mengalami perkembangan yang meyakinkan, kondisi ini dipengaruhi oleh tindakan elit politik, pegawai pemerintah, tentara Indonesia yang kurang mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam melakukan pelayanan terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Selain itu elit partai kurang mengerti arti penting pendidikan politik sehingga hanyalah mengarahkan pada bagaimana memenangkan pemilihan umum yang akan dilaksanakan, selain itu pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia yang membuka kesempatan bagi gerakan ekonomi dari pengusaha pribumi hanyalah berdasarkan kedekatan politis tanpa

melihat kredibilitas perusahaan, begitu juga dalam gerakan koperasi Indonesia yang telah dipengaruhi oleh tindakan politik praktis, sehingga terjadi berbagai penyimpangan yang menghambat pencapaian keadilan sosial dibidang ekonomi.



Lampiran 4

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT PERINTAH

- I. Mengingat :
- 1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.
 - 1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden/ Panglima Besar Revolusi/ pada tanggal 8 Maret 1966.
- II. Menimbang :
- 2.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.
 - 2.2. Perlu adanya djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja.
- III. Memutuskan / Memerintahkan :
- Kepada : LETNAN DJENDERAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT.
- Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi :
1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar

revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung djawabnja seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR
REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.



SUKARNO

Sumber : Sekretariat Negara Republik Indonesia.1978. 30 Tahun Indonesia Merdeka, Buku Ke-3 1966-1975, hlm 568 Jakarta.

Surat Sebelas Maret ini memberi ilustrasi pada halaman 40

Lampiran 5

AGREEMENT TO NORMALISE RELATION

between

THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

MALAYSIA

Recognising the need for close and friendly relations between Indonesia and Malaysia and create a climate conducive to cooperation between the two countries, in the spirit of the Manila Agreement and of brotherliness between the two peoples bound together by history and culture from time immemorial,

THE REPUBLIK OF INDONESIA

and

MALAYSIA

Have decided to conclude an Agreement to normalize relations between the Republic of Indonesia and Malaysia and to this end have appointed as their plenipotentiaries :

For the Government of the Republic of Indonesia :

His Excellency Mr. Adam Malik, Presidium Minister for Political Affairs/Minister for foreign Affairs, Republic of Indonesia,

For the Government of Malaysia :

His Excellency Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Deputy Prime Minister/Minister for Defence, Malaysia.

Who, having examined each other's credentials and having found them and in due form have agreed as follows :

ARTICLE 1

The government of Malaysia in order to resolve the problem between the two countries arising out of the formation of Malaysia, agrees to afford the people of Sabah and Serawak who are directly involved, an opportunity to reaffirm, as soon as practicable, in a free and democratic manner through General Elections, their previous decision about their status in Malaysia.

ARTICLE 2

The government of the Republic of Indonesia in its desire for close cooperation and friendship between Indonesia and Malaysia, agrees, and the government of Malaysia concurs, that diplomatic relations between the two countries shall be established immediately and that they shall exchange diplomatic representation as soon as possible.

ARTICLE 3

The government of the Republik of Indonesia and the Government of Malaysia agree that in view of the above, hostile acts between the two countries shall cease forthwith.

ARTICLE 4

This Agreement shall come into force on the date of signature.

This in witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by the respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Djakarta in duplicate, this eleventh day of August, 1966.-

For the government of the
Republic of Indonesia

For the Government of
Malaysia

Signed

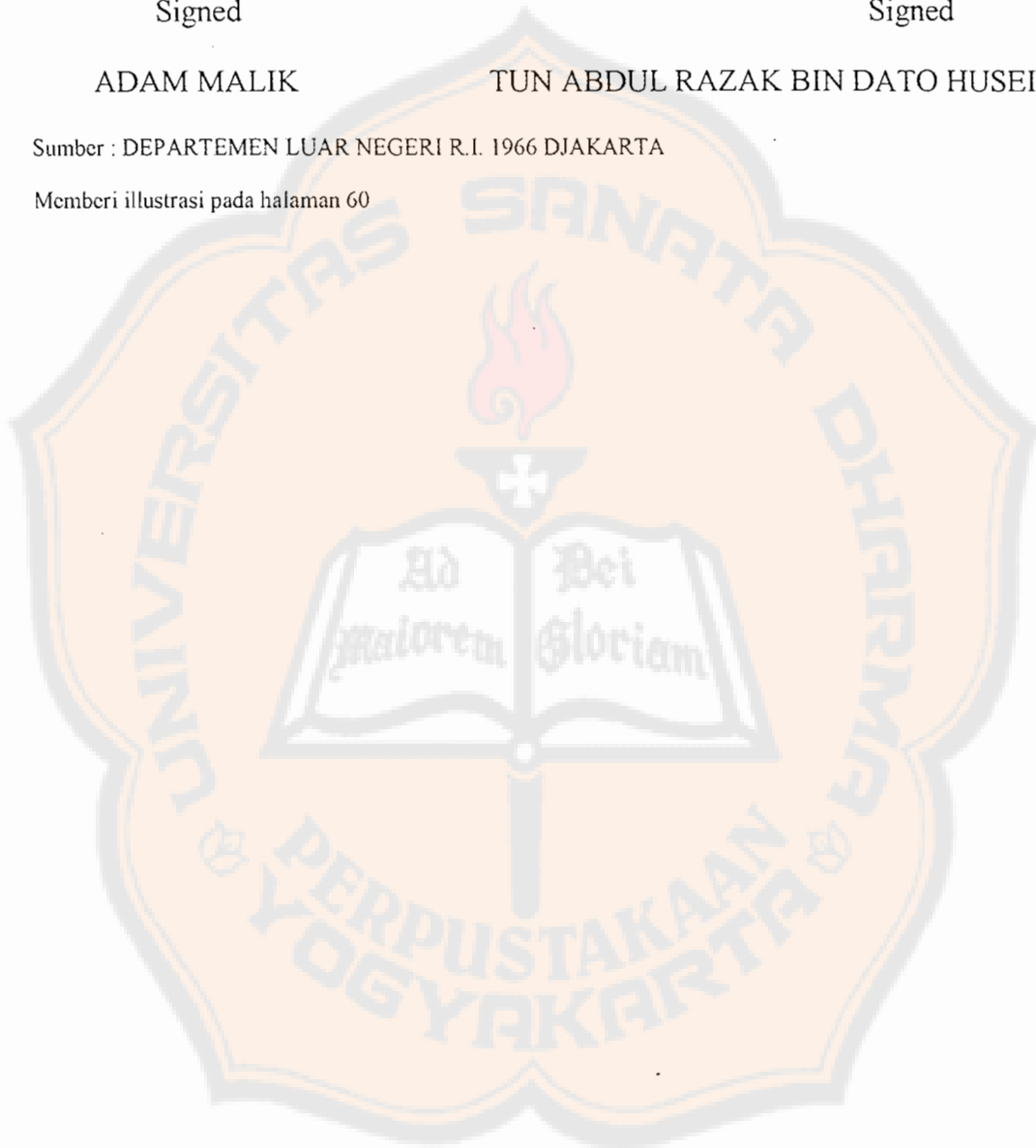
Signed

ADAM MALIK

TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSEIN

Sumber : DEPARTEMEN LUAR NEGERI R.I. 1966 DJAKARTA

Memberi ilustrasi pada halaman 60



Lampiran 6



Sumber : Bahctiar Djamily, 1980, *Hidup dan Perjuangan Adam Malik*, Jakarta : Selecta Group

Gambar diatas memberi ilustrasi pada halaman 55

Lampiran 7



Lima Menlu ASEAN melaksanakan pertemuan. "Kenangan indah yang sukar bisa saya lupakan," komentar Adam Malik melihat foto ini.

Sumber : Bahctiar Djamily, 1980, *Hidup dan Perjuangan Adam Malik*, Jakarta, Selecta Group

Gambar di atas mengilustrasikan peristiwa pada halaman 63

Lampiran 8



Sumber : Hidayat Mukmin, 1991, *TNI Dalam Politik Luar Negeri : Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, Jakarta : Pustaka Harapan
Gambar di atas mengilustrasikan peristiwa pada halaman 79

Lampiran 9



Ketua Presidium Kabinet Ampera, Jenderal TNI Soeharto.

Sumber : Hidayat Mukmin, 1991, *TNI Dalam Politik Luar Negeri : Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, Jakarta : Pustaka Harapan

Gambar di atas mengilustrasikan peristiwa pada halaman 62